

**BELUM DIKOREKSI**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI DENGAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

**3 SEPTEMBER 2018**

Tahun Sidang : 2018 – 2019  
Masa Persidangan :  
Rapat ke : -  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : 3 September 2018  
Pukul :  
Tempat : Nusantara  
Ketua Rapat : Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA  
Sekretaris : Dra. Prima M.B. Nuwa, M.Si  
Acara : Pembahasan RKA K/L Menteri DPDTT Dalam Nota Keuangan  
RAPBN TA.2019  
Hadir : orang, izin orang, sakit orang dari orang Anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA.

**FRAKSI PARTAI  
INDONESIA PERJUANGAN:**

**DEMOKRASI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:  
dari 6 orang Anggota**

**dari 2 orang Anggota**

1. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
2. Drs. Yoseph Umar Hadi, M.Si,

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

**dari 2 orang Anggota**

1. Ir. Fary Djemy Francis, MMA
2. Ir. H. Bambang Haryo Soekartono

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: dari 1 anggota**

1. Nurhasan Zaidi, S.Sos, I

**FRAKSI PARTAI NASDEM:**

**dari 2 orang Anggota**

1. H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH., MH
2. Drs. H. Soehartono

1. DRS. Hamka Baco Kady, MS

2. Ir. Ridwan Bae

3. Drs. H. Gatot Sudjito, M.Si

4. H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A

5. Dr. CAPT. Anthon Sihombing

6. Drs. H. Ibnu Munzir

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**dari 3 orang Anggota**

1. Dr. Ir. Bahrhun Daido, M.Si

2. DRH. Jhoni Allen Marbun, MM

3. Willem Wandik, S.Sos

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

## **JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salah sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.**

**Yang terhormat saudara Menteri Perhubungan.**

**Serta seluruh jajarannya, serta para hadirin yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat, berdasarkan informasi dari sekretariat daftar hadir rapat ini telah ditandatangani sebanyak 21 anggota, dan terdiri dari 7 Fraksi atau telah memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan pasal 251 ayat 1 melakukan tata tertib DPR RI, sebentar pasti akan bergabung beberapa teman-teman Komisi V DPR RI dalam perjalanan pembahasan, oleh karena itu izinkan saya membuka rapat kali ini dan berdasarkan ketentuan pasal 246 ayat 1, rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam Rapat kerja pada hari ini.

Saudara Menteri dan para anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati, sesuai dengan surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, nomor AG/12 626 DPR RI/7 2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal penyampaian jadwal pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2019 untuk pembahasan tahap pertama, rencana kerja dan anggaran Kementerian lembaga mitra kerjanya setiap provinsi dialokasikan waktu dari tanggal 3 sampai dengan 14 September 2018 yang hasil pembahasan akan disampaikan kembali secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI, untuk di sinkronisasi selanjutnya pembahasan tahap kedua untuk penyesuaian RKAKL dialokasikan waktu pada tanggal 28 September sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018, terkait dengan pembahasan RKA Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2019 pada hari ini perlu kiranya kita bangun kesepahaman bersama bahwa Rapat kerja pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2019.

Yang telah kita laksanakan pada bulan Juni sampai Juli pada tahun 2018 yang lalu, oleh karena itu dalam kesempatan Rapat kerja pada hari ini tentu kita lebih fokus dalam hal bagaimana program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat, pada umumnya serta program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat pada khususnya di daerah kabupaten kota tertentu, sebagaimana pendapat usulan, dan saran yang disampaikan oleh Komisi V DPR RI dalam rapat terdahulu yang mungkin bisa

diakomodir atau direalisasikan sesuai pagu anggaran, nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2019.

Sebelum kita membahas lebih lanjut, tokoh acara pada hari ini, perlu kiranya kami informasikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2019 yang disepakati dalam Rapat kerja dan dengan Menteri Perhubungan pada tanggal 6 Juni 2018 dan pagu nota keuangan RAPBN tahun 2019.

Kementerian Perhubungan, pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2019, kesimpulan Rapat kerja 6 Juni 2018 pagu kebutuhan status 4,049 trilyun 55 juta 166 ribu rupiah, penyesuaian pagu indikatif 44,1 trilyun, Rp. 44.132.398.444.000, pagu anggaran dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran Rp.2019, 41.544.917.054.000.

Saudara Menteri Perhubungan serta para anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati, demikian pengantar kami, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada saudara Menteri Perhubungan untuk menyampaikan penjelasan pokok-pokok kebijakan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perhubungan dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2019. Untuk penjelasan dan pembahasan yang lebih detail akan kita lokasikan pada rapat dengar pendapat dengan masing-masing unit organisasi Eselon I kementerian Perhubungan yang rencananya kita agendakan mulai minggu depan.

Kami persilakan, beberapa catatan-catatan yang pak Menteri perlu ketahui dalam pembahasan kita dengan para Eselon I yang pertama berkaitan dengan pola presentasi pak, dari pada Eselon I, kita harapkan dalam pembahasan kedua ini dengan para Eselon I itu nanti itu sudah lebih detail programnya, kita tidak membahas satuan tiga tetapi dari masukan para anggota kita berharap bahwa masing-masing unit atau para eselon I itu bisa menggambarkan berkaitan dengan program disetiap daerah, provinsi sehingga para anggota tahu persis tentang program-program apa yang dilaksanakan didaerahnya, saya kira pola presentasi pada tahun lalu itu bisa dipakai pak, kemarin itu terlalu umum kita bisa mengerti sehingga banyak anggota yang merasa bahwa ini bukan presentasi pembahasan anggaran, tetapi ini presentasi seminar, jadi seakan-akan tidak ada bedanya kita membahas anggaran bersama dengan DPR RI, dengan pembahasan anggaran dengan lembaga-lembaga lain apakah media dan sebagainya, kita minta supaya masing-masing daerah itu bisa digambarkan lebih rinci walaupun tentu tidak kita bahas dalam kerangka satuan tiga, itu yang pertama pak.

Yang kedua kita berharap dalam pembahasan kita kedepan nanti dengan (rekaman tidak jelas) dan untuk itu kita perlu kebijakan dengan pak Menteri, pada hari ini berkaitan dengan catatan-catatan dan usulan-usulan yang disampaikan oleh anggota baik secara lisan, secara langsung, secara tulisan, apa saja yang bisa diakomodir dan mana yang belum bisa diakomodir, dan apa persoalannya dan kemungkinan bisa didiskusikan berkaitan dengan usulan dari anggota khususnya penyesuaian program untuk mitra kementerian Perhubungan, yang ketiga, yang penting lain pak Menteri,

bahwa program-program yang berkaitan dengan kemasyarakatan langsung yang berbasis masyarakat, itu kita minta supaya itu lebih diperbanyak anggarannya, beberapa contoh program bantuan bus, bantuan program yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan menyangkut lampu dan sebagainya itu catatan dari pembahasan kita untuk ditambahkan anggarannya sehingga ditahun 2019 ini program tersebut itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dan program tersebut diperbanyak kegiatan sosialisasi pak, jadi kalau ada apa namanya bantuan-bantuan yang sifatnya kemasyarakatan kita memberikan dukungan, kita melakukan evaluasi, monitoring dan kita tanyakan langsung kepada masyarakat apakah program tersebut itu mendapat manfaat langsung dirasakan masyarakat atau seperti apa bentuknya sehingga kita bisa perbaiki ditahun-tahun berikutnya.

Itu beberapa catatan-catatan, kita akan memberikan kesempatan kepada pak Menteri perhubungan berkaitan dengan kebijakan pak, terhadap pikiran-pikiran dari para anggota, terkait dengan pembahasan kita dengan Eselon I dan setelah itu nanti kami akan memberikan kesempatan kepada anggota, untuk bisa memberikan pendalaman, satu yang belum kita putuskan kemarin dipembahasan awal itu adalah besaran anggaran masing-masing eselon I itu belum kita memberikan persetujuan baru kita memahami, karena bisa saja dari anggaran Eselon I ini terasa lebih membutuhkan kita bisa mengusulkan untuk kita dorong untuk penyesuaian para Eselon I yang lain.

Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada pak Menteri Perhubungan, silakan pak.

**F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Saya dapat bahan ini dari judul dan ininya tidak nyambung, judulnya adalah Rapat kerja Menteri Perhubungan, yang kedua adalah Rapat kerja Menteri Perhubungan dengan pembahasan rencana kegiatan anggaran kementerian dan lembaga. Tetapi satupun tidak ada yang dikatakan tadi catatan yang menggambarkan sinkronisasi format ini antara pembahasan rencana kegiatan anggaran walaupun tidak satuan tiga, tetapi jelas formatnya ini hanya bicara pagu anggaran, oleh karena itu, kalau itu acara kecuali kalau hanya Menteri, hanya pandangan boleh, tetapi belum bersifat rencana anggaran kementerian negara lembaga, bahan ini, oleh karena itu saya kira perlu diperbaiki seperti misalnya apa namanya seperti tidak perlu satuan tiga, satuan dua bukanlah begini, bukan bicara pagu anggaran, ini hanya besaran pagu, bukan rencana kegiatan, sampai saya lihat kebelakang satupun tidak nyambung, hanya model seminar, perspektif, presentase, padahal kita bicara kegiatan, contoh misalnya (rekaman tidak jelas) katakanlah Dirjen Perhubungan Darat, di mana provinsi mana, kegiatannya dimana, bentuk kegiatannya bagaimana, berapa anggarannya, kalau satuan tiga memang sampai kedetail, kita tidak perlu memang, karena dulu sampai detail, tetapi ini sama sekali tidak ada, oleh karena ini supaya arah rapat ini jelas, apakah hanya sebagai pengantar pak Menteri ya monggo, baru dilanjutkan supaya bahan ini lengkap, supaya kita tidak terlalu bertele-tele, terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik pak Jhoni Allen, saya kira pak Jhoni juga pernah di pimpinan Banggar ya, hari ini kita sebenarnya berbicara tentang kebijakan dari pak Menteri, terkait catatan-catatan yang tadi sudah diberikan pada anggota Komisi V DPR RI kan begitu, kita perlu sampaikan catatan seperti yang disampaikan pak Jhoni kita berharap itu pada saat pembahasan dengan pak Jhoni saat itu sudah tidak begini lagi pak, itu sudah lebih detail walaupun kita tidak menuntut satuan tiga, walaupun disitu sudah kita sudah mendapatkan pemahaman terhadap masukan-masukan yang sudah diberikan oleh para anggota Komisi V DPR RI pada saat kita pembahasan pendahuluan.

Pak Jhoni Allen saya kira itu, catatan penting, pak Menteri saya kira instruksikan itu pak, untuk bisa kita bahas secara detail dengan para Eselon I, itu kita berikan kesempatan pada pak Menteri Perhubungan, silakan pak.

#### **MENTERI PERHUBUNGAN:**

**Terima kasih pimpinan Komisi V DPR RI.**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya.**

**Yang terhormat bapak Ketua Komisi V DPR RI wakil Komisi V DPR RI dan para Bapak Ibu anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.**

Pada dasarnya kita dalam kordinasi ini memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara umum saya sampaikan pak ketua dan para anggota bahwa rapat kali ini memang sifatnya makro dan kami akan mempersiapkan rapat yang lebih detail, seperti yang pak ketua sampaikan, bapak yang lain sampaikan bahwa lebih detail akan dilakukan oleh Eselon I, dan juga disitu akan mengandung berkaitan dengan catatan-catatan yang disampaikan anggota dan ada beberapa jawaban, juga kita akan melakukan suatu kegiatan yang memang dikhususkan bagi masyarakat, kami sepakat pak jadi kita akan lakukan satu realokasi bahkan agar untuk masyarakat itu kita utamakan, berkaitan dengan proporsi masing-masing Dirjen, memang sudah ada satu rancangan-rancangan, tetapi monggo sesuai dengan ketentuan sejauh itu memang bisa dilaksanakan kami menerima apa yang diputuskan.

Oleh karenanya izinkan saya menyampaikan penjelasan secara garis besar pokok-pokok kebijaksanaan kementerian perhubungan, kaitannya dengan nota keuangan RAPBN tahun 2019 sebagai agenda Rapat kerja, dimana hal tersebut berkaitan dengan pagu anggaran 2019 dan kegiatan strategis kementerian keuangan, sesuai dengan surat bersama Menteri (rekaman tidak jelas) 19 Juli 2018 ditetapkan pagu kementerian anggaran perhubungan, 1,5 trilyun dengan komposisi sebagai berikut, Sekjen itu 702 milyar, Irjen 92 milyar, darat itu 3,6 trilyun, laut 10,4 trilyun, udara 7,3 trilyun, kereta api 15,2 trilyun, litbang itu 122 milyar, BPSJM 3,7 trilyun dan BPTJ 192 milyar, dalam konteks menurut jenis, maka belanja operasional sebanyak 5,7 trilyun, terdiri dari (rekaman tidak jelas) atau 8% untuk biaya pegawai dan belanja barang sebanyak 32,3 trilyun atau 6%, memang ada upaya untuk memproduktifkan belanja barang untuk diutamakan menjadi belanja modal,

belanja operasional sebanyak 3,7 triliun, belanja barang tidak mengikat sebanyak 10,4 triliun atau 25% dari pagu.

Dalam rincian kegiatan birokrasi sebanyak 1,6 triliun dan pelayanan sebanyak 6,4 triliun yang terdiri dari pelaksanaan Diklat pengembangan BPSD, sebanyak 1,6 triliun dan keperintisan 3,69 triliun, yang meliputi pelayanan bersubsidi perintisan, infrastruktur maintenance operation dan pada tol laut, jembatan laut dan belanja barang berkarakter modal pada diserahkan pada masyarakat banyak 625 milyar yang meliputi pengadaan bus, kapal, terminal, jembatan timbang, doking kapal, pengerukan alur serta kegiatan perawatan dan kalibrasi. Selain itu terdapat (rekaman tidak jelas).

Belanja modal dialokasi sebanyak 25,3 triliun, atau sebanyak 61% dari total pagu, sedangkan komposisi anggaran berdasarkan sumber pendanaan rupiah murni 26,7 triliun melalui SBSN sebanyak 9 triliun, PHLN sebanyak 3,3 triliun PNPB sebanyak 1,8 triliun, BLU sebanyak 1,5 triliun.

Bapak ketua, bapak wakil ketua dan anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati, pada kesempatan ini kami laporkan pagu anggaran 2015 sebanyak 1,5 triliun, bila dibandingkan pagu 2019 44,1 terdapat penurunan sebanyak 2,5 triliun, terutama pada barang operasional, namun demikian kementerian perhubungan tetap berkomitmen untuk memenuhi target renstra dari Presiden, prioritas rasional aspirasi rakyat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, mendorong sumber pembiayaan lain diluar APBN seperti kerjasama, biaya SBSN, peningkatan peran swasta dan BUMN, peningkatan swasta murni untuk proyek strategis dan bernilai ekonomis dan kerjasama pemanfaatan.

Dua melakukan kegiatan operasional, dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas, paket meting dalam dan luar kota, pembatasan pengelolaan gedung kantor dan pengadaan kendaraan bermotor, penyusunan skala prioritas, kegiatan studi dan penyusunan dokumen perencanaan, beberapa pilot projek kerjasama Pemerintah badan usaha yang dilakukan kementerian Perhubungan antara lain, uji kelaikan kendaraan, uji kelaikan jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor, pengembangan transit developmen, pembangunan jalan kereta api, Makasar Pare-Pare, pengembangan bandara Komodo dan pengembangan pelabuhan Anggrek dan pelabuhan Bau-Bau.

Selain kerjasama Pemerintah dan KPPU terdapat beberapa pelabuhan yang disiapkan, kerjasama pemanfaatan paling tidak 21 pelabuhan dimana 21 pelabuhan telah ... tanggal 21 Agustus 2018 yaitu Probolinggo dan (rekaman tidak jelas), sedangkan yang lain dalam proses pengajuar KSP, perhubungan udara yang dilaksanakan KSP terhadap 4 bandar udara yaitu Ciliwut, Raden Inten, Sentani, dan Fatmawati.

Pelayanan modal di 4 bandara tersebut, Tobing Bandara Banyuwangi, KPBU di bandara Labuan Bajo juga kerjasama di 9 bandar udara, ingin mendapatkan pengalihan anggaran sebanyak 632 milyar yang selanjutnya digunakan untuk menambah anggaran di 7 bandara prioritas diantara adanya Sukabumi dan sebagainya.

Bapak ketua, bapak wakil ketua, Bapak Ibu anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.

Dalam kesempatan ini kami mengusulkan strategis kementerian perhubungan tahun 2019 darat berupa pengadaan 80 bus, tipe A di 6 lokasi pembangunan internasional di 16 lokasi, rehabilitasi terminal 18 lokasi, pembangunan kapal 6 menit, pembangunan pelabuhan penyebrangan sebanyak 12 unit, dan pembangunan pelabuhan 6 menit, rehabilitasi (rekaman tidak jelas), pembangunan sungai baru di 4 lokasi, pengadaan dan pemasangan kelengkapan jalan di 33 provinsi, pengadaan alat uji bermotor di Bekasi, rehabilitasi (rekaman tidak jelas) dan angkutan jalan penyebrangan, Dirjen Kereta Api merupakan pembangunan jalan baru kereta api, sebanyak 144 KM, penyelesaian jalur kerta api sepanjang 274 km, (rekaman tidak jelas).

Dirjen Perhubungan laut berupa angkuta ternak sebanyak 6 trayek, (rekaman tidak jelas) sebanyak 113 trayek, penyelenggaraan angkutan tol laut sebanyak 21 trayek, pembangunan pelabuhan laut sebanyak 19 lokasi dan pengerukan alur sebanyak 2 lokasi, (rekaman tidak jelas)

Dan dari 15 bandara baru, pembangunan terminal baru di 10 lokasi, pembangunan (rekaman tidak jelas) sisi bandara, pengadaan peralatan penunjang pengamanan penerbangan angkutan udara sebanyak 198 penumpang 40 rute perintis dan 1 subsidi angkutan kargo.

BPSDM berupa diklat koperasi, Diklat pemberdayaan masyarakat sebanyak 286 ribu, terdiri dari pendidikan bidang pembangunan sebanyak 47 ribu, pendidikan bidang perhubungan laut sebanyak 213 ribu, pendidikan bidang perhubungan udara sebanyak 24 ribu dan kerjasama KPPU (rekaman tidak jelas).

BPTJ merupakan kelanjutan terminal A, jati jajar, pembangunan otomatik trafic control sistem, koridor DKI Jakarta, pengadaan (rekaman tidak jelas), diruas jalan nasional dan penataan lalu lintas kota sejabodabek.

Litbang pengukuran efisiensi transportasi dalam mendukung logistik terhadap gross logistik domestik berhitung, penelitian pemanfaatan tingkat komponen dan pemanfaatan modifikasi pesawat udara dan penelitian rancang bangun udara atau (rekaman tidak jelas) angkutan penumpang pesawat katagori angkutan kargo dengan memberdayakan desain organisation over, Irjen dan Sekjen memiliki kegiatan berupa audit review pengawasan, investasi kerjasama dukungan manajemen dan teknis pengawasan, kegiatan administrasi, dari gedung kantor, bapak ketua dan bapak wakil ketua dan para anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati, demikianlah secara umum dapat kami laporkan rencana kerja anggaran kementerian perhubungan dengan nota APBN 2018 dan kami akan berikan suatu laporan yang detail pada saat rapat dengan eselon I dan selanjutnya kami mohon kepada bapak, dukungan dan saran serta arah (rekaman tidak jelas), terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Menteri Perhubungan, tadi beberapa input catatan dari pembahasan kemarin, menyangkut program-program yang berbasis



langsung ke masyarakat itu pak, itu perlu ada penambahan alokasi jadi perlu ada kebijakan dari pak Menteri itu yang belum kita dapatkan gambaran, yang kedua itu kita harapkan bahwa presentasi dengan RDP dengan para eselon I sudah harus bisa mendapatkan informasi gambaran tentang apa yang perlu disinkronisasi penajaman atau apa, yang disampaikan oleh para anggota itu saya kira catatan yang pak Menteri bisa di sampaikan kepada para Eselon I pada saat kita rapat minggu depan.

Saya kira itu sekali lagi kami samapikan terima kasih dan sebagaimana biasanya kita akan masuk dalam pendalaman, untuk itu sesuai dengan daftar penanya, maka kesempatan pertama pak Rendy, siap-siap pak Ridwan Bae, kita sepakati ya menyangkut waktu bagaimana? 3 mneit ya, begitu pak Djadi? Nanti kita sepakati ya sampai jam 16, nanti kalau dibutuhkan kita perpanjang kalau masing-masing 3 menit, berarti 45 menit, kurang lebih 1 jam.

Pak Rendy siap-siap pak Ridwan Bae.

**F-PDIP (Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, MM, MBA):**

**Baik terima kasih pimpinan.**

**Yang saya hormati bapak Menteri dan seluruh jajarannya.**

**Teman-teman Komisi V DPR RI yang saya cintai.**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Yang pertama pak Menteri saya hanya ingatkan bahwa dalam perjalanan program Pemerintah itu harus tidak terlepas dalam persoalan perundangan yang berlaku, yang kedua adalah dengan program Pemerintah yang sudah dibuat baik program jangka pendek, menengah dan panjang, nanti kepada Dirjen pengembangan laut, saya hanya ingin mengingatkan bahwa Undang-undang tidak ada yang namanya Undang-undang pelayaran, disitu sudah sangat jelas, membantu pelabuhan itu ada 3 jenis dan 3 kriteria (rekaman tidak jelas).

Sementara 3 kriteria itu adalah pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan penumpang, jadi ini sebenarnya harus di fokuskan ketiga ini ditambah lagi yang namanya tol laut, saya kira berharap Pemerintah jangan keluar dari jalur ini untuk melaksanakan anggaran daripada RKAKL kedepan, jadi masuk ke kriteria, karena jujur saja terlalu banyak saya lihat kriteria yang (rekaman tidak jelas), salah satunya ada 5 (rekaman tidak jelas).

Kalau 5 kriteria ini dipenuhi oleh satu pelabuhan pak Menteri (rekaman tidak jelas) membutuhkan waktu 3-4 tahun, saya kira inilah kementerian inilah yang melakukan ini, jangan nanti pak Menteri membuat peraturannya pak Menteri yang melanggarnya, saya kira dalam membuat kriteria ini berhati-hatilah supaya tidak membuat peraturan kriteria yang bisa dilanggar oleh kementerian ini jadi disederhanakan sajalah, karena mengingat bahwa kita melakukan percepatan pembangunan, infrastruktur, demikian juga di Dirjen Udara saya kira sama, saya mohon juga beberapa pelabuhan udara

(rekaman tidak jelas) ini bisa di perhatikan, sesuai dengan target, jangka menengah dan jangka pendek dari Pemerintah dalam program anggaran Pemerintah kedepan, saya kira itu saja pak Ketua, dalam persoalan penganggaran dalam kedua program kedepan ini, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Rendy, kalau pak Rendy bicara di Rakernya singat natni pada saat RDP baru panjang, jadi harus di pahami betul, pak Ridwan silakan pak.

**F-PG (Ir. RIDWAN BAE):**

**Terima kasih pimpinan dan anggota yang terhormat.**

**Pak Menteri.**

**Pak Sekjen dan pak Dirjen.**

Berulang kali ... muncul mungkin menyakitkan hati pak Menteri, saya berpesan agar daerah rawan menjadi perhatian utama, dalam artian (rekaman tidak jelas).

Yang kedua pak Menteri barangkali perlu dipikirkan persoalan pelabuhan rakyat, walaupun Undang-undang memang sekarang belum kelihatan, tetapi bahwa kalau tidak bisa dibilang katagori umum seperti sekarang misalnya mungkin bisa masuk dalam DAK, karena pelabuhan rakyat itu pak Menteri sangat dibutuhkan sekali, kita bangun banyak pelabuhan tetapi pelabuhan utama sebetulnya pengumpul komoditas sebenarnya ada di masyarakat pak, pelabuhan rakyat, kesulitan kita yang ada disana pak, saya banyak keliling lapangan, masyarakat banyak mengangkut dia punya komoditas yang ada untuk kita jual, pada akhirnya harga itu jadi mahal.

Pak ketua izinkan saya barangkali saya ada aspirasi dari beberapa bagian daerah untuk kepada pak Menteri, kalau boleh saya disini menyerahkan kepada pak Menteri secara tertulis.

Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik pak Menteri itu usulan aspirasi dari daerah yang betul-betul seperti ini juga ada yang seperti disampaikan pada saat RDP sebelumnya, nanti kita bahas lebih dalam pada saat pembahasan Eselon I minggu depan.

Pak Subarna, siap-siap pak Muhidin.

**F-P. GERINDRA (H. SUBARNA, SE, M.Si):**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Terima kasih pimpinan.**

**Yang saya hormati pak Menteri beserta seluruh jajaran.**

Saya langsung saja pak tadi kalau masih ingat kalau langsung saja, pertama untuk penyelenggaraan angkutan udara perintis pak, saya usul pembina penumpang di Tasikmalaya pak, yang kedua runaway Tasikmalaya diperpanjang, selanjutnya yang kedua, jalur kereta api pak, terima kasih ini anggaran yang luar biasa 15 trilyun berbicara tentang mengurangi kemacetan terus terang saja daerah kami khususnya Jawa Barat bagian selatan, tidak bisa naik kereta api pak, apa sebab karena memang sangat sulit ada sih ada tetapi Jakarta Surabaya, kira-kira bisa seperti apa ini supaya daerah kami itu bisa menikmati kereta api, apakah double tracknya ditambah atau tidak yang terpenting saya tidak bisa menggunakan kereta api padahal itu jalur masuk kedaerah kami.

Itu orang Tasik orang Garut, mungkin Banjar bisa, selanjutnya yang ketiga, ini usulan konkrit pak, saya punya keyakinan untuk seluruh anggota DPR RI ingin ada yang dibawa ke daerah, saya beberapa kali mengusulkan (rekaman tidak jelas), sebagaimana tadi pimpinan telah disampaikan, tolong ini mungkin kalau didaerah kami apalagi barang diperlukan sekali, bagaimana anggota dewan ini bisa berkontribusi langsung terhadap masyarakat. Mungkin anggaran ini perlu ditambah atau di perjelas nanti, berapa anggaran untuk PSU ini, yang kira-kira untuk beberapa daerah, dikami yang untuk penduduk luar biasa pak, terutama Jawa Barat bagian selatan pak.

Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih atas perhatiannya,  
*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

**Terima kasih pak Subarna.**

Pak Muhidin, silakan, siap-siap pak Jhon.

**F-PG (H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A.):**

**Terima kasih pimpinan.**

**Pak Menteri dan seluruh jajarannya.**

Saya kira ini menjelang penyusunan RAPBN kita ini, saya kira yang pertama-tama kita tidak membuat kebijakan yang sifatnya baru sama sekali, jadi kita harus melanjutkan kebijakan kita yang sudah pernah kita janjikan dan sudah pernah kita sepakati waktu yang lalu.

Jadi pak Menteri kalau ini tidak kita lakukan karena banyak kegiatan yang sudah pernah dikerahkan disini, tetapi realisasi dilapangan itu realisasi dilapangan kayaknya belum terakomodir pak, contohnya, saya itu pernah berbicara disini waktu jadi pimpinan dengan pak Menteri ada daerah terpencil di daerah saya, itu kabupaten yang sama sekali tidak ada apa-apanya itu, yaitu di Bangkai Kepulauan, waktu itu kita hanya minta bantuan terkait dengan studi kelayakan tentang pelabuhannya, ini sampai sekarang ini kita sudah datang disana, dan mungkin belum berjalan, saya tidak tahu ini, supaya ini nanti sehingga ini tahun terakhir Pemerintah Jokowi Widodo ini berbahaya pak, nanti dianggap kita ini berbohong inikan kurang bagus, apalagi daerah terpencil, kita sudah sepakat dengan nawacita, daerah terluar, terpinggir, pulau-pulau, inikan berbahaya, itu satu.

Kemudian yang kedua itu menyangkut masalah bandara yang ada di Bangkai laut ini daerah terpencil juga, jauh tidak mungkin didatangi oleh pejabat Eselon I, tetapi Menteri (rekaman tidak jelas) sudah pernah kesana, saya kira (rekaman tidak jelas) di bidang perikanan, ini Pemdanya sudah membebaskan lahan, tinggal Penloknya yang mereka minta, mudah-mudahan sudah clear, karena sudah dimeja pak Menteri, ini yang mereka selalu tanyakan ini, mohon ini direalisasikan, karena ini tahun terakhir Pemerintahan Presiden sekarang ini, kalau tidak ini ada bumerang bagi Pemerintah sekarang, ini yang ingin saya sampaikan, dan itu daerah saya dengan pak Rendy ini daerah Pemerintah, hanya mereka minta Penloknya supaya bisa direalisasikan, karena tanahnya sudah minta 5 tahun yang lalu.

Kemudian, kegiatan-kegiatan lain yang berkelanjutan, kalau bisa di lanjutkan, menyangkut masalah, waktu itu sudah disepakati, tetapi saya tidak tahu apa diteruskan untuk kita atau tidak, tetapi setelah kita baca rencana kerja ini juga belum ada, yaitu studi terkait dengan rencana penetapan lokasi kereta api lintas Sulawesi, ini hanya studinya saja dulu, supaya kita punya alasan bahwa memang dana sangat terbatas, dan tentu yang kita kedepankan itu studinya, berarti ada kemauan Pemerintah untuk melakukan (rekaman tidak jelas) ini saya hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berkelanjutan, supaya kami dari daerah pemilihan itu, dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tengah ini bisa kita berbicara, saya kira ini pak Menteri, terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Muhidin, selanjutnya pak Jhon.

#### **F-PAN (JOHN SIFFY MIRIN):**

**Selamat sore.**

**Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi V DPR RI.**

**Yang saya hormati pula pak Menteri.**

**Pak Dirjen.**

Hari ini saya sampaikan tentang peristiwa pesawat (rekaman tidak jelas) yang terjadi pada 11 Agustus 2018 kemarin, saya secara pribadi memberikan (rekaman tidak jelas) tim terbaru yang menangani insiden ini, pada waktu itu pesawat memang sore terbang dari ... dan terjadi kecelakaan, tim terbaru ini menangani sangat luar biasa, dan saya sendiri hadir di lokasi di Bandara Sentani, dan Basarnas bahkan juga KA Bandara dan TNI Polri, penanganannya cukup cepat, dan satu hari setelah terjadi, dan ditemukan satu jiwa anak kecil umur 12 tahun diselamatkan dan saya bertemu dengan, namanya Jumadi, itu apa, saya secara pribadi sangat senang dengan proses penanganan ini.

Dan pada waktu upacara pelepasan jenazah saya sampaikan kepada semua elemen yang ikut terlibat dan hadir pada waktu itu, peristiwa seperti ini jarang terjadi, lebih cepat bisa selamatkan satu nyawa. Tidak seperti peristiwa sebelumnya di Danau Toba dan lain-lain, yang kami ajukan protes tetapi ini justru bagus, itu yang pertama, yang kedua setelah saya tanya kepada beberapa pihak, (rekaman tidak jelas) itu ada yang 3 bulan lebih belum bayar, kami mohon pak Menteri menjadi catatan, jangan sampai pesawat perintis yang menangani didaerah-daerah pedalaman terpencil, (rekaman tidak jelas) karena secara psikologi pilot pasti terganggu.

Jadi saya tidak tahu (rekaman tidak jelas) tetapi saya mohon pak Menteri menjadi catatan jangan sampai seluruh pesawat perintis yang melayani didaerah pedalaman terpencil memang kembali seperti itu, karena secara psikologis pilot pasti terganggu, jadi saya tidak tahu tetapi inikan ada faktor cuaca sore hari, (rekaman tidak jelas).

Jadi saya harap pak Menteri faktor seperti ini yang terjadi, jadi saya harapan tolong apa namanya (rekaman tidak jelas) seluruh pesawat perintis yang melayani diseluruh Indonesia tetap menjadi perhatian, itu yang pertama, yang kedua menyangkut PON 2020 itu pasti di daerah Jaya Pura itu kan perlu angkutan masal, karena posisi PON 2020 letaknya stadion utama ini ada di kampung harapan, dan jalan antara Bandara Sundari menuju Jayapura itu satu-satunya jalan Sundani menuju Jayapura, pasti tingkat kemacetan akan terjadi sehingga opsi-opsi lain seperti membuat pelabuhan sungai, pelabuhan danau, jadi bisa upayakan ada pelabuhan danau (rekaman tidak jelas) terus kampung harapan, supaya bisa mengatasi kemacetan pada waktu PON 2020, yang ketiga mohon maaf usulan saya sebelumnya menjadi perhatian bagi pak Menteri dan pak Dirjen, terima kasih, Tuhan memberkati.

**KETUA RAPAT:**

Salah satu kemarin kita kunjungi ke Jawa Timur, (rekaman tidak jelas) sebagai jembatan udara di Jawa Timur itu, kampungnya pak Jhoni ya, (rekaman tidak jelas), apa nama bandarannya pak, terima kasih pak, ibu Intan tadi minta supaya belakangan saja, berikutnya pak Nurhasan Saidi, siap-siap pak Bahrun Daido, pak Nurhasan dulu ya pak.

**F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I):**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Saudara Menteri serta jajarannya.**

**Pimpinan komisi serta rekan-rekan sekalian.**

Saya hanya dalam tahapan pembahasan awal anggaran 2019 ini saya hanya memberikan catatan kecil saja atau penjelasan beberapa point dimana dari anggaran, gambaran anggaran APBN 2019 ini Dirjen Kereta Api dan hubungan laut tetap menjadi prioritas terbesar, memang harus di push biar kereta api dan hubla bisa eksis didalam pembenahan dan sudah terbukti, catatan yang saya tanya ini masalah pelabuhan pak, khususnya pelabuhan pak timbang yang di Subang, karena hari ini rencananya ada audiensi dari stakholder masyarakat Subang, tentang merespon rencana pembangunan (rekaman tidak jelas) mungkin tidak jadi diterima ya pak, batal ya, Rabu, mungkin juga kita baiknya sebelum ketemu mereka ada penjelasan dari pak Menteri, khusus terkait Patimbang.

Karena memang ini akan menjadi sebuah pelabuhan yang cukup besar, tetapi disini saya lihat belum seperti belum ada progres belum ada penjelasan, apakah Patimbangan ini modelnya KPBU kerjasama Pemerintah dengan badan usaha, atau kerjasama pemanfaatan atau bagaimana modelnya, kiranya kami dapat penjelasan mungkin sedikit banyak. Dukungan kami juga terhadap pelabuhan rakyat yang disampaikan sebelumnya ini mengingat kejadian-kejadian danau toba dan beberapa tempat ini juga, harus menjadi perhatian yang cukup kuat, ketegasan dari pihak kementerian terhadap pelabuhan kecil juga kalau di mobil itu modelnya KIR ya, layak jalan kapal itu ini sangat prihatin, jangan sampai nunggu, atau masih murah nyawa di negeri kita ya, jadi jangan sampai nunggu ratusan nyawa yang hilang, memang balik lagi itu pada persoalan anggaran, tetapi paling tidak tata tertib aturan Undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, sebelum anggaran itu ada saya pikir ini sebuah hal antisipasi ketegasan dari kita, karena kemarin ketika kita kunjungan spesifik terhadap danau toba itu sebenarnya bukan persoalan anggaran saja, ini soal persoalan kedisiplinan dan ketegasan seluruh Pemerintah terkait, baik Pemerintah daerah maupun pusat, khususnya ketika kunjungan dengan pak Budi ini kunjungan darat ya, ketika ke Danau Toba ya, itu kepada ulah manusia ketidakdisiplinan, mungkin faktornya hanya 23% selebihnya ulah kelalaian manusia, terima kasih itu saja.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Silakan pak.

**F-PD (Dr. Ir. BHRUM DAIDO, M.Si):**

Masalah Kertajati pak, ini Kertajati setelah di resmikan yang terkesan tergesa-gesa dan kita juga gembira sudah diresmikan Presiden setelah itu Kertajati seperti menara gading, ini kapan diresmikannya. Masyarakat pada nanya, walaupun katanya Surabaya, saya cek cek juga jalurnya belum jelas, ini perlu ada progres juga pak, supaya akhirnya banyak spekulasi masyarakat, perlu penjelasan ini pak, sehingga ini luar biasa terobosan Pemerintah terhadap Kertajati, tetapi operasionalnya saya pikir supaya ada geliat ekonomi juga cepat jalan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Pak Menteri nanti untuk kita akan menerima aspirasi dari masyarakat di Patimbang mungkin hari Rabu, ini berkaitan dengan persoalan lahan, mohon kalau bisa dari Kementerian Perhubungan, bisa sama-sama mendampingi pak, supaya kita bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat Subang.

Pak Bahrn Daido siap-siap pak Willem Wandik.

**F-PD (Dr. Ir. BHRUM DAIDO, M.Si):**

**Terima kasih pimpinan.**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang saya hormati pak Menteri, pak Sekjen, Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya.**

**Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi V DPR RI.**

Yang pertama saya minta kepada pak Menteri bahwa baru-baru kami lakukan kunjungan kerja di kabupaten Jawa Timur, khususnya di danau... dari Pemerintah daerah katakan bahwa kejadian-kejadian seperti yang di danau toba itu juga terjadi disana pak, (rekaman tidak jelas), dia minta pengadaan kapal, hampir setiap bisa terjadi kecelakaan, tetapi tidak diekspos, untuk itu barangkali kami minta Dirjen Perhubungan Darat bersama pimpinan, jadi minggu ini kira-kira kami akan melakukan kunjungan kerja sama pimpinan

Komisi V DPR RI, di danau Toti dan Matano disana Pemerintah daerah dan masyarakat minta pengadaan kapal penyebrangan dari Serako ke Morowali, dan dari antar kecamatan disana, katanya sering setiap satu jam ada kecelakaan, sama seperti yang terjadi di danau toba.

Tetapi tidak diekspose oleh Presiden, untuk itu meminta kepada Komisi V DPR RI dan Dirjen Perhubungan, kemudian kementerian perhubungan meminta peninjauan disana pak, itu yang pertama yang kedua pak Menteri untuk Bandara Palopo, itu kurang lebih dia punya runway 1600 meter, itu ada dua kali penerbangan Garuda dan (rekaman tidak jelas), tadinya Garuda dalam satu minggu 4 kali, jadi sekarang 4 kali, saya melihat disana kapasitas penumpang sangat luar biasa pak Menteri, harapan kami kalau bisa pak Menteri karena hampir rata-rata dari Bandara itu rutenya langsung ke Jakarta, harapan kami kalau bisa runway diperpanjang sampai 2000 pak Menteri 2000 meter dan setelah itu, kami minta ke Departemen Perhubungan, setelah 2000 meter kami minta satu pesawat bombardir yang menghubungkan antara pesawat Palopo Luraya dan Jakarta.

Dari bandara itu rutenya langsung ke Jakarta, harapan kami kalau bisa runway di perpanjang sampai 2000 pak Menteri dan setelah itu kami minta kepada Departemen Perhubungan, setelah 2000 meter kami minta pesawat bombardir yang menghubungkan antara Palopo, ... dan Jakarta, itu sangat antusias masyarakat disana agar ada penerbangan langsung dari daerah Palopo ke Jakarta, itu pak Menteri, itu pendalamannya ke Pak Dirjen Perhubungan darat, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan pak Willem Wandik.

#### **F-PD (WILLEM WANDIK, S.Sos):**

**Baik pak ketua, Bapak Ibu Komisi V DPR RI**

**Dan juga Menteri Perhubungan beserta jajaran yang kami cintai dan kami bangakan.**

Saya merasa terkait dengan urgensi penerbangan di tanah Papua saya merasa penting untuk saya (rekaman tidak jelas) pada kesempatan ini, dimana kami memiliki data terdapat 188 rute angkutan udara perintis penumpang kemudian 12 rute untuk angkutan udara perintis kargo dan satu rute subsidi angkutan udara kargo khususnya 188 (rekaman tidak jelas) perintis penumpang di Indonesia, dan sebanyak 17% di Sumatera dan 2 % di Jawa, dan 3% Kalimantan dan 5% Sulawesi dan 2% Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara 2% dan Maluku 5% Papua barat, melayani angkutan udara perintis penumpang 7% sedangkan provinsi Papua 47%, data ini menunjukkan



bahwa urgensi pelayanan, jasa pelayanan transportasi udara itu ada di Kawasan timur Indonesia, seperti halnya yang kami hadapi ada di tanah Papua yang sangat syarat dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam jasa penerbangan, pelayanan penerbangan di tanah Papua, dimana kami melihat sampai hari ini walaupun berbagai upaya dilakukan, tetapi masih terus terjadi kecelakaan di tanah Papua, seperti halnya baru-baru di kabupaten yang sama, pernah terjadi kecelakaan itu pesawat trigana, terus kemari ini di kabupaten yang sama juga, kami menghadapi bencana, musibah itu pesawat... dari kabupaten ... menuju ... bintang dan hari ini posisi saya ada di kabupaten Merauke dan seketika itu memang saya kehabisan tiket dan staf saya yang di kabupaten Merauke dia sudah membeli tiket pesawat ini dan saya salah satu penumpang yang akan ikut dari Merauke Jayapura.

Akan tetapi hanya sepintas saya bilang Merauke (rekaman tidak jelas) tetapi kita akan kesulitan, karena tidak ada penumpang sama sekali, ke Jayapura, lebih baik kita cancel dulu, lebih baik menunggu besok, akhirnya saya kembali ke hotel ketika saya kembali ke hotel, malamnya saya mendengar informasi bahwa ada insiden pesawat yang saya cancel itu, dan memang ini seringkali kami menyuarkan rapat-rapat ini dengan mitra memang hambatan yang kami alami disana, selain juga hambatan geografis, juga hambatan regulasi, dimana sebenarnya dari dulu sudah ada aturan untuk setiap lapangan terbang disana itu sebenarnya ada rute penerbangannya disana ada Jawa pura menuju Bintan, itu harus melewati rute yang mana, dari Merauke atau (rekaman tidak jelas) menuju ke kabupaten bintang mau kemana, selain rute sudah ada ketentuan jam terbangnya, jam terbangnya untuk kawasan pegunungan itu hanya jam 5 pagi sampai jam 10 lepas dari itu, diatas jam 10 sudah tidak bisa karena cuaca disana sering sekali berubah-ubah, seperti halnya yang kami alami kunjungan Komisi V DPR RI dengan mitra kami, ketika kami melakukan perjalanan kunjungan lanjut (rekaman tidak jelas) kami tidak bisa keluar karena lewat jam 9 kami sudah ditutupi kabut tebal dan pesawat yang jemput kami tidak bisa lagi, waktu itu pak Dirjen Perhubungan Udara pak Agus, saya tidak tahu apakah Pak Agus ada atau tidak.

Kondisi seperti ini sebenarnya sudah sering kali kami ingatkan tetapi yang sering kami lihat disini adalah terkait dengan kedisiplinan, kelalaian itu, ya mungkin perlu ada aturan yang benar-benar mengikat bagi maskapai penerbangan yang beroperasi tanah Papua dan para penerbang, sehingga aturan itu bisa mendisiplinkan mereka untuk bisa menepati waktu terbang dan rute penerbangan, selain itu kami juga pada kesempatan ini menyuarkan terkait Balai diklat penerbangan di tanah Papua, Jayapura, itu statusnya sudah rubah menjadi akademi teknik penerbangan, harapan kami kedepannya, menempatkan tanah Papua ini sebagai lokomotif utama penyapa sumber daya penerbangan yang handal, karena belum lama ini kami telah melakukan (rekaman tidak jelas), lakukan apa, forum kerjasama dengan negara-negara melanesia di pacifik ada 15 negara yang sedang di perjuangkan oleh melalui parlemen ini, untuk membuka hubungan diplomasi 15 negara di kawasan pacifik kemarin dibuka oleh Wapres dan oleh pak Luhut untuk membuka hubungan diplomasi dengan 15 negara di pacifik tentu dengan terbukanya hubungan diplomasi ini juga akan memberikan peluang dan tantangan bagi kita, dalam pelayanan transportasi udara dan juga laut,

untuk itu kami membutuhkan dukunga yang kuat, dalam rangka menyediakan sumber daya penerbangan yang handal, untukantisipasi persiapan hubungan kerjasama pacifik.

Baik iya pada kesempatan ini saya ingin meyampaikan juga, tadi kami masing-masing anggota bahkan pimpinan pernah mengusulkan bus, tidak tahu waktu itu per anggota dengan pimpinan dapat berapa unit waktu itu, saya tidak tahu, 5, tetapi sampai hari ini saya belum pernah tahu itu barang, sampai dimana itu barang, karena itu yang penting, karena kita ditanya terus ini.

Yang berikut, ini sudah banyak kali sudah disampaikan, dan sekarang sudah tidak disampaikan lagi, pak Menteri kalau memang ada uslan saya tolong dibuka kembali, terutama terkait bandara lapangan terbang bandara dan juga ada (rekaman tidak jelas) lainnya, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, pak Willem itu busnya belum selesai pak, tetapi bapak bisa bagikan simbolis dulu kuncinya pak, bisa serahkan kuncinya dulu pak, kalau sudah selesai baru dikirim sama pak Dirjen ke daerahnya.

#### **F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Inikan rapat terbuka, ini bisa direkam, saya kira tidak ada hak legislatif untuk secara regulator apapun menyampaikan kepada masyarakat, kita legislasi hak anggaran dan (rekaman tidak jelas), tetapi itulah yang saya katakan tadi, kalau seandainya, ini sebetulnya sudah rapat, ini sebetulnya bahan ini sebetulnya bahan yang lalu, disinilah kita lihat apa yang disampaikan teman-teman tadi tertampung tidak akibat usulan-usulan oleh anggota dewan yang mewakili dapil itu, disitulah kita bicara kepada Menteri sebagai pengambil kebijakan, Eselon dibawahnya tidak mengambil kebijakan, karena Menteri adalah wakil Presiden untuk megnhadapi legislasi, itu sebetulnya, sehingga pada hari ini sebetulnya hal-hal apa yang kita bicarakan dengan pak Menteri dalam konteks yangs udah kita berikan tadi kalau sudah tergambar disini, sehingga tidak ada lagi, hanya misalnya katakanlah hasil konsultasi atau penelitian atas perhubungan yang dilakukan penelitian didaerah itu, harusnya tergambar disini, kalau tidak tergambar baru ditanya kenapa ada alasan apa, sama yang kedua disini saya baca soal danau toba, tetapi tidak tergambar, dulu yang kita bicarakan bagaimana (rekaman tidak jelas) standar minimal bentuk kapal sehingga kita usulkan untuk membuat satu atau dua kapal, untuk diserahkan, itulah contohnya habis ini belum tergambar, kira-kira apa, karena apa, karena kondisi kapal itu bukan kondisi kapal angkutan umum, (rekaman tidak jelas) harus Pemerintah kan harus memberikan contoh kira-kira begitu pak Ketua mohon maaf kalau saya interupsi, supaya tidak ada menyalahgunakan sehingga tidak ada interfensi, intepretasi dari para ... sekali lagi legislatif tidak punya kewenangan, tetapi mengusulkan dan sekaligus memperjuangkan untuk kepentingan dapilnya, dan itu kita bisa lihat, kalau tidak kita tanya pak Menteri kenapa.

Demikian pimpinan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih pak, ini pak Willem tadi mau menanyakan tentang usulannya ditahun 2018 ini, pak Willem tadi, pak Bambang Haryo, siap-siap pak Hamka dulu.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):**

**Terima kasih bapak pimpinan.**

**Bapak ibu anggota Komisi V DPR RI.**

**Yang terhormat juga pak Menteri beserta jajarannya.**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera selamat sore, om swastiastu.**

Terima kasih pak, saya hanya ingin menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan litbang pak, disini badan litbang kayaknya masih belum ada perubahan ya pak, jadi badan litbang anggarannya sangat-sangat kecil pak, hal ini sangat dibutuhkan untuk kita bisa melakukan satu evaluasi analisis dan evaluasi daripada hasil-hasil yang harusnya kita baik itu membangun ataupun merevitalisasi infrastruktur, kami melihat pak, didalam apa ini mungkin pembangunan daripada infrastruktur, mungkin perlu adanya satu analisis yang mendalam pak, karena hampir pembangunan infrastruktur yang ada kami setuju untuk infrastruktur dibangun sebanyak mungkin, tetapi dengan mempunyai skala prioritas yang memang betul-betul bisa menumbuhkan ekonomi yang kita inginkan pak, mungkin dari transportasi laut, mungkin bapak Menteri lupa mengusulkan bisa juga membangun prasarana-prasarana infrastrktur itu yang ada di poros maritim dunia , poros maritim dunia itu adalah yang pertama tentu alki satu pak, alur kepulauan nasional pertama pak, yang dimana disini selat Malaka yang dilewati oleh sektiar 100 ribu peti kemas yang ada disana, kapal peti kemas yang ada disana, atau sekitar lebih dari 120 juta pak, tetapi kita hanya mengambil porsi kurang lebih, tidak lebih dari 2 juta peti kemas buat disana, sedangkan negara kita yang mempunyai panjang pantai yang pendek, sehingga bisa (rekaman tidak jelas), sedangkan Malaysia dengan tanjung pelepas dan (rekaman tidak jelas) serta penangnya, mereka juga sudah bisa antara 18 20 dan 5 juta peti kemas, jadi disini kami mohon dari Pemerintah bisa mengalokasikan pembangunan ini diwilayah yang strategis ini pak, lalu yang kedua untuk poros maritim kami juga melihat ke poros maritim domestik yang dinamakan tol laut, tol laut ini adalah poros maritim domestik, itu hampir sebagian besar pak, itu tidak bermanfaat atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat publik atau ekonomi ini, kami sudah menganalisis dari di Pelni bahwa ada yang sampai memuat sekitar 8 peti kemas pak, padahal kapasitasnya sampai 540 peti kemas dan sebagainya.

Jadi ini tidak hanya dari sisi jumlah yang efektif, tetapi juga dari sisi apa ini, hasil yang dituju, yaitu peti kemas yang diangkut semuanya tidak terdiksi oleh kementerian perdagangan dan mereka menjualnya ke mekanisme pasar, yang dimana ini merupakan tugas kita juga untuk melakukan perbaikan itu, yang berikutnya adalah permasalahan yang berhubungan dengan perhubungan darat, Dirjen Perhubungan darat itu adalah Direktorat Jendral tujuan dari awal menuju ke tujuan akhir, yang dimana angkutan yang diangkut baik itu barang maupun manusia, itu asal daripada mereka melakukan perjalanan dan akhir setelah menggunakan angkut transportasi itu baik udara maupun laut, maupun kereta api, akhirnya adalah perhubungan darat juga.

Jadi makanya apa di perhubungan darat ini 95% logistik yang ada di semua moda transportasi, ini adalah didarat sedangkan sisanya itu laut dan udara, jadi ini menunjukkan bahwa anggaran dari Direktorat Perhubungan Darat dan Udara ini supaya diperhatikan jangan dikurangi pak, karena ini menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan, jadi kami juga sudah sampaikan ke pak Bambang untuk tidak mengurangi daripada anggaran Direktorat Jendral Perhubungan Darat, menyangkut keselamatan, lalu yang berikutnya adalah masalah yang berhubungan dengan kereta api, infrastruktur maintenance operation, ini juga kami mohon untuk tidak dikurangi pak, ini apa di Jawa Timur saja dari 1400 apa ini tempat untuk lintasan sebidang kita itu hanya 40% yang mempunyai palang pintu, 60% belum mempunyai palang pintu yang sampai detik ini pak, tidak ada penambahan yang secara signifikan, jadi kecil sekali skala penambahannya, jadi ini dan bahkan penjaga palang pintunya pun tidak bisa dideteksi dengan baik, dalam arti mereka tidak mempunyai pedoman jam berapa-jam berapa kereta itu lewat dan sebagainya, dan ini sangat membahayakan transportasi, dan berikutnya untuk Litbang ini tentu juga harus menganalisa, permasalahan yang berhubungan dengan jalur-jalur kereta api barang pak, yang dimana pada jaman Belanda Kereta api barang itu luar biasa pak, hasil kita adalah komoditas pangan yang dimana komoditas pangan ini tidak boleh busuk, jadi harus cepat dan bersifat masal, harus dinaikan kereta api, maka perlunya jalur-jalur baru dari stasiun itu pak untuk tidak bersama-sama dengan stasiun penumpang, jadi mereka stasiunnya berbeda yang kebetulan yang ada di Surabaya kami sangat usulkan pak, tidak ada didalam kota pak, stasiun daripada angkutan barang atau peti kemas itu kami mohon untuk dibangun disekitar apa ini, sekitar teluk lamong, dulu pernah di rencanakan oleh pak Bambang wakil Menteri kita yang lalu, itu untuk dibangun disana, jadi kami mohon untuk bisa dibangun segera terminal peti kemas untuk kereta api KAI, jadi ini tidak hanya di kota Surabaya, tetapi di kota-kota (rekaman tidak jelas) yang betul-betul ini seperti Jogja dan lain-lain pak, jadi kami mohon ini, dan kami juga mohon yang di Semarang di prioritaskan untuk menuju terminal itu yang dari Kalimas apa ini tanjung mas menuju ke ini, dan yang terakhir tentu kami juga mohon pak, untuk bisa diperhatikan jalur kereta api yang ada di Adi Sumarmo, karena kereta apinya itu sudah jadi kurang lebih 4 bulan yang lalu pak, jadi kebetulan saya sudah lihat sendiri, kereta apinya sudah siap, sedangkan jalurnya belum siap, jadi mohon untuk bisa di percepat sehingga kereta itu bisa dipergunakan betul-betul dipergunakan dengan baik, jadi ini yang terakhir mohon maaf pak ketua, permasalahan yang berhubungan dengan alur-alur kita pak, terutama di tanjung api-api ini kebetulan kita sudah

membangun pelabuhan yang luar biasa besar, baik itu pelabuhan veri maupun pelabuhan laut, pelabuhan lautnya hampir dikatakan tidak dipakai sama sekali.

Jadi ini akibat dari pendangkalan yang luar biasa besar, jadi ini merupakan tugas daripada kementerian Perhubungan untuk mempercepat pengerukan daripada alur itu, sehingga ini untuk menjaga keselamatan daripada transportasi karena kalau kapal itu tergerus dengan apa ini lumpur atau pasir mereka akan terjadi penyusutan daripada pelat yang ada dan mereka bisa tenggelam pak, karena pecah atau berlubang, jadi ini yang mau kami sampaikan, moga-moga ini menjadi satu skala prioritas yang diharapkan apa ini termasuk juga pembangunan -pembangunan terminal tipe a jangan sampai terlalu jauh dari kota, yang mana kebanyakan terminal tipe A kita akhirnya tidak digunakan oleh apa ini bus yang ada, jadi akhirnya tidak bermanfaat, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Bambang, pak Hamka siap-siap pak Jhoni Alen.

#### **F-PG (DRS. HAMKA BACO KADY, MS):**

Terima kasih pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati.

Pak Dirjen.

Pak Menteri dan seluruh jajarannya.

Hanya ada dua point pak Menteri yang pertama saya sudah memahami persis bagaimana proses mengenai kelanjutan pembangunan kereta api Makasar sampai Pare-Pare dan apa namanya balai sudah ketemu saya, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu sesuai target pengoperasian awal 2019 akan beroperasi, mudah-mudahan itu bisa terlaksana, terima kasih.

Yang kedua, adalah pembangunan ... pak Menteri, ini luar biasa karena terjadi pergeseran anggaran 225 milyar, pertanyaan saya, kalau terjadi pergeseran anggaran ini berarti bandara-bandara yang merupakan 4 kst dan 4 kpbu, berarti ditunda ya pak Menteri ya, dialihkan ke anggaran untuk membangun (rekaman tidak jelas), oleh karena itu pertanyaan saya nasibnya sebentar ini karean dialihkan apakah tidak dilanjutkan ini yang dikerjasamakan soal tadi karean anggarannya di geser, disisi lain saya berterima kasih karena diperhatikan bentuk unik bisa dikerjakan secepatnya, itu saja pertanyaan saya pak Menteri dan menjadi catatan juga adalah tolong nanti kepala bandaranya disana tolong nanti ada beberapa aduan masyarakat

pak Menteri tidak usah saya kemukakan disini pak Menteri nanti akan saya sampaikan secara tersendiri ya, saya panggil kemarin tetapi tidak sempat, saya hanya mau menetralisir saja aduan dari masyarakat supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang sifatnya politisasi sehingga pembangunan ini tidak jalan, saya masih pegang dan akan saya undang kepala Bandara disana untuk menjelaskan kepada saya agar saya bisa menjelaskan juga kepada masyarakat yang mengadukan itu saya tidak perlu buka itu dan itu adalah saya sampaikan tersendiri pada waktu yang akan datang, terima kasih pimpinan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Hamka, disebelah kirinya pak Hamka itu ada Direktur Bandara, pak Jhoni Allen, siap-siap pak Yoseph.

#### **F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):**

Terima kasih.

**Bapak pimpinan dan kementerian Perhubungan.**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang pertama penegasan kembali ini adalah tindak lanjut kebijakan rapat RKAKL pak Menteri disini ada rapat danau toba, waktu itu pelabuhan yang danau toba, kita waktu kunjungan ke sana bersama Direktorat Jendra Perhubungan Darat mengusulkan bahwa setiap apa itu diberikan satu contoh kapal yang layak, dan itu sudah ditampung, itu yang menjadi standar untuk mereka para pengusaha kapal untuk mencontoh yang bisa dihibahkan kepada pelabuhan kepada setiap pelabuhan yang ada 4 itu, setiap kapalnya saya kira tidak terlalu mahal, supaya memenuhi kriteria untuk menjadi kapal penyebrangan untuk penumpang, yang kedua soal, apa disini walaupun baru kepala (rekaman tidak jelas) tetapi presentasi untuk belanja barang tidak mengikat 10 T atau belanja barang mengikat 2,3T oleh karena inikan kita beberapa pembahasan atau kajian daripada RKAKL sebelumnya terlalu banyak copy paste didalam pembelanjaan barang, sehingga oleh karena itu disini kita melihat apa saja sih, sehingga apakah belanja barang bisa digeser belanja modal yang belum tertampung akibat keterbatasan anggaran.

Oleh karena itu pak ketua, karena ini sisi partnya ini, saya kira dalam hasil rapat, tidak akan ada kesimpulan, oleh karena itu belum ada gambaran yang pasti, seperti belanja barang sampai 10,4T tetapi satupun (rekaman tidak jelas), walaupun tidak satuan tiga apa misalnya, gambarkan ada bus, berapa, berapa nilai anggarannya, kalau satuan tiga itukan sampai tahap berikutnya, tetapi kita harus tahu betul, barulah kita berikan persetujuan kita selama kita menampung, atau memang akibat keterbatasan sehingga

menjadi prioritas tahun berikutnya, sehingga kalau ada usulan-usulan hasil pantauan daripada teman-teman kita sebagai anggota, akibat keterbatasan atau kebijakan, tentunya menjadi prioritas yang tahun berikutnya, saya kira begitu tahapan kita untuk RKAKL selanjutnya.

Yang berikutnya pak ketua, tadi pertanyaannya sudah terlalu lama soal pengalihan anggaran, dari anggaran reguler menjadi anggaran kebandara mungkin ini adalah kebijakan Pemerintah, sah saja, karean Pemerintah mungkin kemarin saya tahu kunjungan Jokowi ke Sukabumi, sah saja, tetapi yang sebelumnya ini saya tidak tahu bagaimana dulu semula ada bandara menjadi membuat anggaran dikerjasamakan 4 lokasi, misalnya penyertaan modal negara, pertanyaannya apakah ini sudah deal belum katakanlah PMN nya.

Itu saja, kalau memang sudah deal yang tidak ada masalah, toh hanya masalah anggarannya saja dari penyertaan modal negara atau kerjasama, kalau sudah deal tidak ada masalah, disini 4 menjadi lokasi PMN yang saya tahu PMN adalah penyertaan modal negara, saya tidak tahu kalau ada penelitian lain dalam konteks PMN misalnya, itu intinya pak ketua, sekali lagi RKAKL kita betul-betul fokus sehingga apa yang menjadi kebijakan Pemerintah, apa yang menjadi hasil tinjauan kita terhadap kunjungan dapil kita, darikatakan berbagai kunker dan reses itu menjadi satu sinergitas bagi bangsa ini, saya kira itu pointnya terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Jhoni ini punya ketua sama-sama di badan anggaran, jadi tahu persis.

Tidak bisa kita lawan pak pembahasan di banggar ini repot kita, pak Yoseph, siap-siap pak Sungkono.

#### **F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):**

**Terima kasih pak ketua.**

**Pimpinan dan anggota yang saya hormati.**

**Bapak Menteri para Dirjen dan seluruh staf kementerian perhubungan yagn saya hormati.**

**Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.***

Pertama penampilan presentasi pak Menteri dalam rangka pembahasan APBN 2019 ini lain daripada yang lain, artinya berbeda dari tahun-tahun yang lalu, ini lebih banyak diwarnai dengan sebuah kebijakan yang kiranya cukup apa namanya, berbeda artinya paradigmanya itu mulai berubah dengan cukup besar dengan bagaimana berupaya untuk mencari

pembiayaan diluar APBN ini, dengan pilot project upaya atau kebijakan untuk melibatkan semua badan usaha partisipasi swasta, kerjasama operasi dan sebagainya, ini saya kira sesuai dengan arahan bapak Presiden, dan oleh karenanya saya pribadi dan saya kira mendukung dan mengapresiasi langkah yang dilakoni oleh Pemerintah dalam hal ini pak Menteri Perhubungan, karena memang menjawab persoalan yang kita hadapi dengan terbatasnya anggaran, sementara kebutuhan pembangunan memenuhi keinginan dari ... sesuai dengan arahan bapak Presiden, saya pribadi dan (rekaman tidak jelas) mendukung dan mengapresiasi Pemerintah dalam hal ini pak Menteri, karena memang menjawab persoalan yang kita hadapi dengan terbatasnya anggaran sementara kebutuhan pembangunan memenuhi keinginan dari daerah-daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur disektor transportasi ini semakin meningkat, namun juga semakin mahal dan semakin sulit kita bisa mendapatkan anggaran yang berlimpah dalam memenuhi kebutuhan tersebut, oleh karena itu memang perlu diberikan satu paradigma baru dalam upaya kita dalam melibatkan publik atau melibatkan BUMN soal operasi dan sebagainya, macam-macam istilah dan macam-macam nama tadi disebutkan dalam presentasi ini, makanya saya mengakat ini sebagai sebuah penampilan presentasi yang berbeda yang cukup sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu meskipun secara pribadi juga seharusnya sudah dilakukan dari dulu-dulu mungkin sekarang mungkin kita baru mulai untuk kerja keras, tetapi ini sangat baik.

Mudah-mudahan ini terus dipertahankan dan disosialisasikan serta ditahukan kepada semua pihak, terutama yang memiliki dana itu untuk terlibat didalam pembangunan, meskipun ini kelihatanya masih banyak yang sifatnya pilot project atau uji coba atau semacam itu atau masih dalam proses negosiasi atau dalam proses pembahasan, mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan kita semua mendukung, saya kira saya yakin teman-teman semua mendukung, terbosan yang dilakukan Pemerintah ini, disemua sektor baik itu laut, darat dan udara saya kira istilah-istilah yang ada disitu, ada KPPU, PKPS ada KSP ada KPPU, BUMN ada KSPI dan sebagainya, dan akhirnya kita lihat, kemudian kita bisa menghemat anggaran, kita bisa mendapatkan anggaran suntikan baru dari pihak ketiga, pihak swasta untuk membangun daerah lainnya, inikan positif, dari dulu juga sebenarnya saya ingin mengajak bapak dan seluruh kementerian, tugas utama kementerian transportasi dan terutama transportasi adalah lebih banyak pengawasan dan pembinaan, dalam rangka untuk mencegah kecelakaan, dalam rangka untuk mengurangi angka kecelakaan korban, baik itu didaerat laut dan udara, jadi fokus kesitu, meskipun juga tanpa mengabaikan pentingnya kita terus membangun, sebagai pembangunan itu penting tetapi saya yakin itu tidak ditinggalkan, pembinaan, pengawasan, regulasi dan sebagainya, terutama pembinaan ke provinsi dan kabupaten, dalam rangka pelaksanaan transportasi itu, karena yang terjadi masyarakat tidak tahu apa-apa yang terjadi dengan kecelakaan disektor transportasi yang diwilayah provinsi atau diwilayah daerah itu yang kena pusat juga, oleh karean itu mohon di perkuat pembinaanya dan reguluasinya untuk mengurangi angka kecelakaan tadi, jadi fokus pada pengawasan, penggunaan ini juga penting.

Yang pertama, jadi saya apresiasi dan mendukung untuk seterusnya menjadi pegangan, Undang-undang yang dipersiapkan oleh kita semua oleh



Komisi V DPR RI dulu Undang-undang tentang transportasi ini, dulu diwarnai oleh satu cita-cita dia melibatkan swasta, (rekaman tidak jelas), dan memang perkembangannya masih tertatih-tatih dan apakah itu swasta atau pihak ketiga belum tertarik, atau memang dari kita yang belum memberikan suatu iklim yang kondusif atau mengajak mereka untuk ikut memikirkan itu, atau bagaimana tidak tahu, untuk itu mulai sekarang kita teruskan, kita kembangkan dengan bentuk-bentuk, terbentuknya seperti KSOP, otoritas pelabuhan, prioritas bandara, bale-bale dan sebagainya, terutama otoritas pelabuhan dan otoritas bandara itu kerangka berpikirnya itu untuk menampung wakil bapak yang ada di daerah supaya mereka bisa memikirkan tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi dari sisi usaha bisnis dengan pihak ketiga, terutama otoritas pelabuhan itu untuk mengundang pihak-pihak lain untuk ikut investasi di wilayah sebagai prioritas pelabuhan mewakili pak Menteri untuk mengajak dan mengundang mereka, sudah menuju kesana, saya senang dan saya mendukung dalam hal ini, oleh karena itu terkait dengan hal ini, saya mengusulkan kepada pak Menteri mohon diperkuat keberadaan wakil pak Menteri itu di daerah-daerah mereka pak, baik itu otoritas pelabuhan, bandara, sehingga mereka itu betul-betul wakil mereka yang ada di Bandara, yang baik dari sisi kelembagaannya dari sisi Sumber Daya Manusianya dari sisi profesionalitasnya perlu diperkuat.

Untuk supaya bisa melaksanakan dan mengawal Undang-undang itu dan menjaga terutama dari sisi keselamatan dan keamanan transportasi itu yang penting, ini yang saya lihat di kalau kita kunjungan ke lapangan itu, padahal ini posisi penting sekali, otoritas, bandara otoritas pelabuhan sebagai wakil pak Menteri.

Yang terakhir ini bersifat himbauan saja pak, mari kita melakukan kunjungan dalam rangka melihat bencana alam di Lombok, kita sungguh sangat prihatin dengan kondisi yang ada disana, karena investasi bertahun-tahun itu luluh lantah dalam tempo 1 bulan, tentu satu hal yang memang kita tidak bisa menghindar atau mengelak karena itu adalah diluar kekuasaan manusia, tetapi tentu tidak semata-mata kekuasaan manusia saja yang menyerah ya, yang penting bagaimana kita mengurangi angka kematian, angka kecelakaan, ternyata sebenarnya kalau masyarakat itu diberitahu jauh hari sebelumnya bahwa akan terjadi gempa, artinya akan meninggalkan bangunan-bangunan yang sifatnya mudah terkena gempa itu maka angka kematian akan bisa dikurangi, ini semua tergantung daripada alat sensor kita di BMKG, ini juga sudah kita perkirakan sebelumnya karena dulu BMKG pernah mengusulkan adanya sensor dibawah tanah.

400 dibawah tanah, untuk mengetahui gerakan-gerakan tanda-tanda bahwa akan ada gempa yang lebih besar itu sebenarnya itu bisa dipantau, saya ... tetapi saya ingin minta bantuan kepada pak Menteri, BMKG ini *deadlock* dibidang alat-alat informasi tentang warning sistem itu pak, dan selama ini tidak pernah mampu bahkan untuk merehabilitasi pun memperbaiki dan merawat, BMKG itu adalah anak dari kementerian perhubungan pak, anak kandungnya pak, kita yang membesarkannya, menjadi badan sekarang ini artinya apa, apakah bisa dari kementerian itu apakah dari APBN nya melalui himbauan kepada pihak swasta seperti Angkasa Pura atau Pelindo atau apa, untuk membantu menyediakan alat-alat sensornya, apakah untuk laut, cuaca, maritim atau untuk (rekaman tidak jelas) dan sebagainya

sehingga anggaran BMKG ini bisa dialihkan terutama untuk kalibrasi dan untuk perawatan, ini untuk membangun yang baru, sehingga kerjasama ini, inikan pihaknya BMKG Bapenas maupun (rekaman tidak jelas) tidak memperkenankan, tetapi selamanya kita tidak bisa mengandalkan, saya mohon bantuan pak Menteri tidak bisa mendorong pihak ketiga tadi, swasta untuk menyediakan alat-alat untuk keperluan sensor early warning sistem, ini yang kita mintakan (rekaman tidak jelas).

Ini pak ketua, saya kira masukan dari saya hal yang terkait dengan teknis rincian, rapat adengar pendapat, terima kasih *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya silakan pak Sungkono.

**F-PAN (H. SUNGKONO):**

***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.***

**Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi V DPR RI.**

**Yang kami hormati pak Menteri dan jajarannya.**

Pertama saya mungkin mengingatkan pembatasan anggarannya pak, di komposisi pagu anggaran bapak ini hampir 37% itu bagian daripada ketidakmampuan kita, tentunya bisa SBSN, bisa apapun disana yang bapak lakukan, supaya kita tidak memberatkan APBN kita harusnya kita evaluasi belanja yang dirasa tidak perlu karena itu bagian yang memberatkan hutang kita, jadi ini yang penting.

Karena angka bapak menunjukkan bagian dari kemampuan kita hanya 64%, kedua saya minta kalau penjelasan mungkin kurang cukup, paling tidak waktu khusus pak, karena beberapa kebijakan bapak yang membuat kreatif barangkali pembiayaan dengan kerjasama itu bagaimana sisi keuntungan dan manfaatnya.

Saya yakin ini pasti mengambil keuntungan yang besar, daripada dengan kondisi negara yang seperti ini, saya yakin negara perlu mengevaluasi provitnya pak, kalau ternyata kedepan memberatkan negara saya pikir tidak perlu lagi melakukan kerjasama dengan kerjasama ini, karena investor nya saya juga belum tahu, di KPBU siapa, dan kenapa dan kebanyakan pemegang sahamnya siapa, jangan-jangan nanti kita tergantung ke mereka justru memberatkan kita sendiri.

Karena pembangunan infrastruktur harusnya negara, tidak perlu hutang, kalau hutang itu sifatnya yang urgent, mungkin untuk sifatnya yang (rekaman tidak jelas) kalau pelayanan publik harus kewajiban murni negara, juga jalan pelabuhan, bandar udara, apapun yang berkaitan dengan infrastruktur harusnya tidak boleh negara tidak mampu, karena disana negara juga belanja lain yang justru (rekaman tidak jelas).

Dengan kepentingan politik yang merupakan bagian dari kepentingan penguasa, jadi saya mohon kreatif ini dievaluasi betul-betul jangan sampai kita tidak tahu, komisi mana yang bisa menyetujui, karena bapak Komisi V DPR RI 5 barangkali berkaitan dengan keuangan, Komisi XI DPR RI barangkali, karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain, negara harus transparan, jangan sampai kebijakan ini Pemerintah tidak tahu, yang penting kami melakukan pola-pola dengan model seperti ini.

Itu menurut saya, beberapa tadi disampaikan teman-teman keinginan membangun di daerah masing-masing yang juga lebih banyak, saya pikir kalau pembangunan ini dioptimalkan difungsikan kami setuju, contoh pembangunan yang dibangun tidak digunakan, ya mungkin kesalahan masa lalu ya, mungkin berubah apa pimpinan, ganti Menteri ganti pola, saya pikir ini harus di evaluasi, jangan sampai bangunan-bangunan yang sudah dibiayai begitu besarnya, kita kunjungan tidak manfaat, ternyata uang yang sudah dikucurkan tidak dinikmati, maka dari itu contoh saja bandara Kertajati Pemerintah membuat program jangan sampai pembangunan yang sudah begitu besar... ternyata kita diam, langkah selanjutnya apa, padahal kalau membangun biaya besar harusnya itu bisa dinikmati rakyat banyak itu pak.

Kedua hal yang lain menyangkut efisiensi, kalau belanja berkaitan dengan pelayanan publik mohon ini ditingkatkan, saya tidak tahu karena yang paling mampu mengelola bapak, karena kami tidak tahu satuan tiganya, barangkali ini, yang selanjutnya bapak, saya ada spirasi ini, satu kabupaten kota perbatasan di wilayah Kalimantan Utara, tepatnya itu di kota Kutai Barat dan disana ada satu jalur bukan hanya Menteri perhubungan, nanti pasti berkaitan dengan Menteri PU, kabupaten Mahakam Hulu, saya kemarin ketemu yang sifatnya perlu perhatian karena kota Mahakam Hulu itu berada di perbatasan Indonesia, itu sangat tidak punya infrastruktur sama sekali, kalau menuju kota ini 3,5 jam naik kapal, ini mohon ada koordinasi dengan kementerian yang terkait supaya ada perhatian untuk itu, karena satu kota itu tidak punya jalan tembus beraspal begitu, barangkali ini yang bisa dilakukan karena kalau kita ngomong jujur pak, kalau di daerah perbatasan kita tidak punya fasilitas yang memadai bagaimana mobilisasi yang penting (rekaman tidak jelas), saya pikir mohon ada semacam bagian yang jadi perhatian khusus karena daerah-daerah lain yang dikembangkan seperti ini sudah ada persetujuan jadi kota paling tidak harus ada perhatian dari Pemerintah jangan sampai dibebaskan, bagaimana masyarakat disana meskipun jumlahnya tidak banyak, saya dengar kabupaten ini tidak banyak penduduknya, tetapi sudah berbentuk satu kota yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

Ini saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mengingatkan kita bagaimana mengelola uang negara yang supaya tidak melanggar Undang-undang yang tadi disampaikan, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Sungkono, sekarang pak Unais.

**F-PKB (K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM, M.Pd.I):**

**Terima kasih.**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pak Menteri dan seluruh jajarannya.**

**Kawan-kawan Komisi V DPR RI yang saya sayangi.**

Bapak Menteri, jadi saya ini beberapa waktu yang lalu melakukan aspirasi dengan seluruh Pemerintah kabupaten di dapil saya Madura dari kabupaten (rekaman tidak jelas) kemudian Sampang dan Sumenep, ada beberapa hal yang menjadi titik berat apa yang disampaikan mereka, pertama soal penambahan volume kendaraan, jadi Madura itu menjadi crowded trafichnya dan mungkin bisa dikatakan macet, untuk wilayah jalan pantai selatan, jadi Madura itu ada pantai selatan, pantai utara, dan pantai selatan ini sudah overload kendarannya, untuk usulan mencari solusi sebetulnya karena tidak mungkin pertumbuhan kendaraan yang sedemikian banyak dan jalan yang tidak berkembang, itu dibiarkan begitu saja, jadi harus ada solusi alternatif, transportasi alternatif, salah satu yang menjadi (rekaman tidak jelas) itu adalah menghidupkan kembali kereta api di Madura, jadi itu bisa awali dengan studi kelayakannya dulu karena memang dari jaman Belanda dulu sudah ada kereta api dari sumenep sampai Bangkalan.

Tetapi kemudian beriring waktu mati karena transportasi kereta apinya itu menggunakan ini, betul-betul kereta api, dan bahan bakarnya kemudian tidak terpenuhi barangkali seperti itu, dan tidak maksimal akhirnya mati. Dan sekarang transportasi itu menjadi alternatif pilihan yang lain ketika overload kendaraan paska suramadu itu menjadi sangat sedemikian rupa membikin crowded dan masuknya kendaraan-kendaraan besar itu juga membuat kendaraan apa tidak bisa mendahului kendaraan yang lain karena jalan sempit, jadi kalau jalan lambat ya bisa menular, dan itu sangat menghambat perekonomian, itu yang pertama, jadi yang kedua terkait dengan RIP pak Rencana Induk Pelabuhan, itu seharusnya menjadi basis perencanaan untuk pengembangan pelabuhan diseluruh Indonesia, khusus di daerah pemilihan saya itu, ketika saya berbicara tentang pengembangan pelabuhan itu mereka mengatakan ini terbentur dengan LRT yang belum kelar, yang seharusnya rencana induk pelabuhan itu menjadi basis perencanaan awal menjadi (rekaman tidak jelas) surat izin mengemudi, jadi saya kira ini pak Menteri mohon di percepat, begitu karena saya dengar sebetulnya sudah berproses tetapi ini kok lemot, dan itu juga menghambat, menghambat persoalan yang menyangkut pelabuhan, kemudian yang ketiga, oh iya, di jalan Madura ini sudah ada pemetaan ruang, dimaan menjadi tempat lahan tembakau, lahan pertanian garam, dan pelabuhan juga, jadi pelabuhan kalau ideal itu (rekaman tidak jelas)

Itu Belanda sudah bikin mapnya, mereka sudah mapping mana yang layak jadi pelabuhan dan ini sudah bagus dari ini, dari Surabaya, untuk menjadi tempat sandara kapal besar, kapasitas pelabuhan yang besar, itu salah satu yang kami tangkap pada saat reses yang ketiga.

Kemudian yang keempat, daerah kota ... itu terdiri dari ratusan pulau, ada 125 pulau disitu pak, dan itu membuat (rekaman tidak jelas) salah satu alternatif untuk tidak terisolir itu tidak hanya tol laut tetapi perlu bandara, jadi kadang kala ada pulau yang misalnya dari sepekan pak, pulau sepekan itu satu desa satu pulau bayangkan kalau satu kecamatan itu ada puluhan pulau bisa dibayangkan tingkat kesulitannya, dan itu kalau misalkan dari pulau yang terpencil datang kepelabuhan didaerah sepekan itu lalu kemudian mereka tidak mendapatkan alternatif kendaraan karena cuaca buruk sampai bermalam, berhari-hari bahkan berminggu-minggu disini, dan akhirnya mereka diberi kayak seperti makanan dan sebagainya, tidur dipelabuhan dan seterusnya, saya kira ini kondisi dimana mereka terisolir banget oleh karena itu saya kira alternatif bandara negara kepulauan itu menjadi bagian dari solusi untuk membuka keterisoliran dari dunia luar, sebab kalau menunggu kapal, kapal itu seminggu kadang per 5hari kadang kalau cuaca bagus, satu kali, kalau misalnya tidak pada rate berikutnya bisa dibayangkan, kalau kebutuhan pokok mereka habis bisa dibayangkan betapa menderitanya orang di kepulauan.

Saya kira itu pak ketua dan mungkin nanti hasil usulan dari Dapil saya 4 kabupaten itu akan saya sampaikan karena (rekaman tidak jelas).

Mohon nanti resepectnya dari pak Dirjen, ingin menyampaikan usulan di Dapil itu, terima kasih pak Ketua, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya bu Saniatul.

#### **F-PG (Hj. SANIATUL LATIVA):**

***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.***

**Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang saya hormati pak Menteri beserta jajarannya.**

**Pimpinan Komisi V DPR RI.**

Menyoroti apa yang disampaikan atau di kilaskan oleh bapak Menteri tadi, ini saya menanggapi menyoroti bahwa memang ada dimasing-masing Dirjen dan juga kegiatan strategi yang tadi disampaikan ini ada dua Dirjen yang anggarannya (rekaman tidak jelas) diantaranya Dirjen Perkeretaapian, Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara, namun disini untuk kegiatan strategis Kementerian Perhubungan, untuk Dirjen Perkeretaapian, pembangunan untuk jalur kereta api yang rencananya dari jam di Palembang itu tidak masuk disini, jadi memang pada saat itu sempat tercuat kabar berita bahwa bapak Presiden kita, bapak Jokowi, dengan peraturan Presiden nomor 58 tahun 2017 membatalkan 14 proyek strategis nasional termasuk

salah satunya adalah proyek kereta api di Palembang, padahal untuk transportasi ini sangat ditunggu oleh masyarakat Jambi, seandainya tidak dibatalkan tetapi hanya ditunda pertanyaan saya sampai kapan pak, mohon penjelasannya karean publik sudah banyak tahu.

Kan ada prioritas yang tidak diberikan seperti dalam proses pembebasan lahan, kemudian kepastian pembiayaan, kordinasi lintas sektor, dan upaya percepatan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perpres tersbeut, jadi mohon dijelaskan supaya kami yang dari Dapil Jambi wakil dari sana, jika ketemu masyarakat selalu ditanya saya bersama pak Bakri itu selalu ditanya bagaimana bu perkembangan, pembangunan rel kereta api yang di Palembang ini, itu yang pertama, kemudian yang kedua, mengenai masih adanya truk pengangkut batu bara melewati jalan nasional tidak pada waktunya yang dilakukan oleh perusahaan angkutan batu bara yang mana in menjadi keresahan ditengah-tengah masyarakat, termasuk saya pak, karean saya juga sebagai pengguna jalan yang jika kegiatan kunjungan dapil atau kunjungan kerja (rekaman tidak jelas) sampai ke Jambi itu sekitar 4 jaman, sehingga sepanjang jalan itu angkutan batu bara memenuhi jalan.

Kadang antriannya macetnya bisa sampai 3 kilo 5 kiloan, bahkan sampai 2 minggu yang lalu itu sempat terjadi bentrok antara angkutan batu bara dengan masyarakat yang ada disekitar situ, sampai sempat akan dibakar, ini mohon bagaimana supaya dari kementerian perhubungan bisa ada koordinasi dan solusi karena kasihan pengguna jalan ini, karena apa, menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengenai jalan nasional itu yang mengatur adalah kementerian, sehingga kabupaten atau provinsi tidak punya kewenangan untuk mengatur masalah transportasi pengangkutan batu bara termasuk masalah (rekaman tidak jelas) jadi bagaimana supaya kordinasi sesuai denga kesepakatan untuk menertibkan batu bara baik dari mulut tambangnya kemudian angkutannya, maupun jumlah tonase dan dapat memonitor pelaksanaan batu bara dari mulut tambang ke ... akhir, karena inikan sudah menjadi kewenangan kementerian pusat.

Sehingga sampai saat ini pak masih saja angkutan batu bara itu memenuhi jalan dan merkea tidak mau ngalah tidak mau minggir, jadi mengambil jalan pengguna jalan yang lainnya, saya juga termasuk pengguna jalan yang selalu dapat maslaah itu, kemudian yang ketiga, sejak November 2013 Kemenhub sudah menghidupkan aliran sungai sebagai jalan transportasi upaya ini dilakukan dengan untuk mengurangi beban jalan raya dan juga mengurangi polusi, jadi aliran sungai dapat bermanfaat sebagai salah satu jalur transportasi jika disiapkan infrastrukturnya, seperti mungkin pelabuhan angkutan sungai, kemudian dermaga halte sungai, usulan saya kemarin sempat saya sampaikan beberapa saat waktu Rapat kerja beberapa bulan yang lalu, tidak masuk didalam sini, dermaga kayu untuk dijadikan halte sungai, itu terletak di desa makmur jaya dan desa bunga tanjung, kecamatan batara tanjung barat, jadi mohon pak ini bisa dimasukna sebagai aspirasi karena ini sangat ditunggu oleh masyarakat, karena saya sendiri beberapa hari yang lalu, masyarakat disana, memang untuk transportasi sungai dan laut memang sangat dibutuhkan oelh mereka, baik untuk menurunkan orang atau barang, sehingga dermaga kayu sangat dibutuhkan sekali.

Dan yang terakhir, mengenai JPU karena usulan di tahun 2018 kemarin sudah saya sampaikan, tetapi tidak terealisasi, untuk di kabupaten (rekaman tidak jelas) yang mana jalan dua jalurnya sudah dilaksanakan oleh kementerian PUPR, tinggal untuk penerangan jalan, jadi saya minta untuk dimasukan di tahun ini untuk JPU nya, pun demikian dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami pak willem mengenai bus sekolah pak, karena surat, usulan maupun ... juga sudah kita sampaikan, namun juga sampai saat ini belum ada, entah hilang kemanakah BOS itu kita tidak tahu, jadi demikian ada 5 item yang saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan solusinya, saya akhiri *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*.

Terima kasih pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Bu Eem, siap-siap pak Bakri.

#### **F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):**

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Om swastiastu.**

**Pimpinan Komisi V DPR RI serta kawan-kawan Komisi V DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan.**

**Bapak Menteri beserta jajaran.**

Pertama saya ingin mengapresiasi, karena ditahun lalu kita banyak juga membahas anggaran untuk sarana prasarana transportasi untuk mensukseskan Asian Games, alhamdulillah tadi malam sudah penutupan dan Asian Gamesnya sukses, dan selanjutnya saya juga ingin menanyakan terkait skeme kerjasama yang mana anggarannya dikerjasamakan dengan pinjaman dan sebagainya, yang dikenal dengan SBSN mungkin mohon dijelaskan juga, pak, saya kira masalah kerjasama ini alangkah baiknya diprioritaskan untuk daerah perkotaan yang memang punya nilai komersil tinggi, tetapi untuk daerah-daerah itu saya berharap jangan ada kerjasama dengan pihak manapun, kita mamahami bahwa keterbatasan ruang (rekaman tidak jelas) kita sehingga kita memang perlu ada kerjasama, cuma mungkin ada batasnya

Artinya tolong nanti dijelaskan untuk kedepan kalau kerjasamanya berapa puluh tahun sehingga kita bisa tahu apakah itu akan merugikan kita atau tidak, itu yang paling penting, dan tentu saja kalau investor pasti siapapun pasti ingin mengejar profit, bagaimana antara benefit dan profit bisa seimbang, jangan sampai profit yang dihasilkan oleh investor itu lebih besar bahkan merugikan yang tadinya kita ingin mendapat manfaat berupa benefit untuk masyarakat pelayanan untuk masyarakat, ternyata pelayanannya tidak

prima, tidak maksimal, itu juga tolong menjadi pertimbangan utama pak, untuk selanjutnya, terkait untuk angkutan darat, pak Dirjen Darat, kita kemarin rapat dengan kementerian PUPR untuk jalan nasional itu ternyata kebanyakan rusaknya itu adalah oleh truk yang apa, yang punya bobot melebihi kapasitas, ini memang harus kerjasama dengan menhub, terutam adi masalah jembatan timbang, oleh karena itu di jembatan timbang benar-benar disiplin dan tegas, jadi kalau memang benar-bener itu truk angkut yang bobotnya over capacity ya harus ditindaktegas untuk dikurangi karena apa itu tidak hanya merugikan apa, berdampak terhadap kecelakaan tetapi juga merugikan negara juga, karena apa, hampir kemarin itu kalau tidak salah itu 17 trilyun untuk anggaran preservasi jalan, itu rata-rata rusaknya oleh angkutan yang kapasitasnya memang amat sangat tinggi, jadi kuncinya juga di jembatan timbang itu benar-benar orang yang harus bertindak tegas jangan yang ketika ada kelebihan walaupun sedikit (rekaman tidak jelas).

Ini harus kerjasama juga dengan Pemerintah daerah, bagaimana jembatan timbang itu benar-benar harus, agar jangan sampai anggaran kita mungkin hanya untuk memperbaiki jalan, yang jalan itu dirusak oleh mereka, itu yang pertama, terus kemudian terkait masalah kecelakaan, untuk kecelakaan udara, meamng menurun ya, tetapi untuk laut dan darat meningkat, ini perlu dipertimbangkan, bagaimana ada teknologi khusus bagaimana angkutan masa itu yang benar-bener kalau misalkan ada kecelakaan itu jangan sampai terjadi meninggal atau misalkan cacat total, tolong itu dipertimbangkan, walaupun hari ini untuk anggaran perhubungan darat, turun, yang kedua terkait perbaikan, terminal tipe A, terminal tipe A ini kalau di konsep untuk masa yang akan datang, harus dikonsep strategis juga, tidak sekedar bagus bangunanya, layak bangunannya tetapi tidak harus diintegrasikan tidak hanya berguna untuk konektivitas tetapi bagaimana disitu ada ruang-ruang yang bisa mengakomodir UMKM, jadi ada ... efek tidak hanya dalam hal fungsi utamanya, tetapi juga dalam hal ekonomi juga perlu dipertimbangkan, jadi bagaimana pembangunan terminal tipe A yang hari ini dikelola atau dibangunnya oleh kementerian perhubungan, itu juga perlu diperhatikan, karena biasanya yang namanya terminal pasti ada yang namanya pedagang, kalau pedagang tidak diakomodir maka dia akan semerawut dan sebagainya, maka biasanya bangunan akan mengganggu fungsi utama terminal tersebut, untuk itu kedepan perlu dipertimbangkan bagaimana terminal bisa ,.... Tidak hanya untuk fungsinya saja tetapi untuk ekonominya juga ada.

Kemudian untuk kereta api *alhamdulillah* hari ini nilainya cukup besar paling tinggi diantara Dirjen yang lain, dan *alhamdulillah* juga saya berterima kasih karean beberapa tahun yan glalu saya sering menyampaikan terkait kereta jalur kereta Cianjur yang mungkin disini kelihatan agak terang dana bisa dianggarkan, semoga untuk kedepan bisa di fungsikan, saya belum tahu targetnya kapan bisa difungsikan, tetapi minimal itu bisa mengurangi terisolirnya kabupaten Cianjur yang mana terletak antara Jakarta dan Bandung, tetapi dia sering terisolir dengan kemacetan, semoga dengan adanya ini kemacetan itu bisa terurai.

Kemudian, untuk Dirjen kelautan, pada tahun 2017 kalau tidak salah untuk anggaran 2018 itu saya pernah melihat itu ada usulan untuk kajian di Cianjur, tetapi sampai hari ini saya belum menerima penjelasannya, hasilnya



seperti apa dan pada anggaran untuk 2019 saya tidak melihat apa-apa lagi, Cianjur bagian selatan, perlu saya sampaikan Cianjur bagian selatan ini kalau dari sini sekitar 8 jam Bapak Ibu, jadi memang benar-benar Jawa Barat bagian selatan tadi yang disampaikan pak ... memang daerah yang terisolir, daerah yang tertinggal jadi kalau ada pembangunan infrastruktur alangkah baiknya untuk daerah Jawa Barat untuk lebih di prioritaskan, walaupun hari ini ada jalur lintas selatan yang dibangun tetapi fasilitas pendukungnya, sarana dan prasarana dan lain sebagainya itu masih belum ada, walaupun mungkin di perhubungan udara akan dibangun seperti itu, tetapi untuk daerah Cianjur selatan itu akan tetap terisolir kalau tidak ada sarana dan prasarana pendukungnya yang mereka bisa bersambung, terus untuk BPPJ ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, ini menurut saya untuk hari ini sudah tidak relevan lagi kalau jangkauannya hanya Jabodetabek, karena apa, karena pendukung ibu kota itu sudah meluas ke Cianjur, Sukabumi, Karawang, sedangkan ini masih pakai konsep yang lama, badan pengelolaan transportasi Jabodetabek itu dalam rangka untuk bagaimana mengintegrasikan transportasi dengan ibu Kota dan untuk hari ini yang penyangga ibu kota itu tidak hanya yang daerah-daerah itu, yang daerah itu sekarang sudah mulai padat yang jabodetabek sudah mulai padat dan hari ini juga kalau misalkan BPPTJ survei berapa orang yang kerja di Jakarta, yang bolak balik didaerah banyak diantaranya yang di Sukabumi, di Sukabumi yang merkea belum berangkat subuh atau sebelum subuh dari Cianjur juga ada, dari Karawang juga ada yang kerjanya adalah di Jakarta, oleh karena itu konsep BPTJ kalau misalkan pengelolaannya hanya Jabodetabek maka itu sudah tidak relevan, maka itu alangkah baiknya ini diperluas, yaitu daerah penyangganya sampai ke Sukabumi, juga sampai ke Cianjur, dan karawang, kalau misalkan kemudian karena ini kita bicara tidak hanya tahun ini pak, tetapi kita beberapa puluh tahun yang akan datang, kita berbicara harus futuristik, karena ini kita bicara (rekaman tidak jelas) inikan sudah beberapa tahun yang lalu, saya kira hari ini sudah tidak relevan, dan saya lihat juga anggaran untuk BPTJ itu sangat-sangat minim, paling kecil bahkan kalau saya lihat itu, pokoknya sangat minim, jadi dengan kapasitas orang, mobilitas orang yang begitu (rekaman tidak jelas) saya kira diberi tugas yang cukup berat, dengan anggaran segitu memang amat sangat mini, dan itu sudah tidak relevan, oleh karena itu mungkin perlu ada kajian baru pak, untuk bagaimana penyangga ibu kota ini tidak hanya Jabodetabek, tetapi untuk daerah-daerah disekitarnya itu menjadi bagian dari pembangunan BPTJ seperti itu, karena memang faktanya hari ini sudah seperti itu.

Kalau dulu memang hanya di Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, tetapi sekarang daerah-daerah itu sudah jadi padat, bahkan sudah jadi metropolitan, jadi yang urban ini adlaah Cianjur Sukabumi dan Karawang, jadi sudah tidak relevan, jadi ini paradigma pembangunnya sudah mulai (rekaman tidak jelas) seperti itu.

Terus juga mungkin saya kira untuk BPTJ saya kira termasuk yang paling punya peluang ya, karena nilai komersil tinggi, maka untuk kerjasama ini punya peluang tinggi, untuk BPTJ kalau tadi saya lihat, banyak kerja sama untuk di BPTJ inilah punya peluang untuk menampung itu semua, mungkin itu saja terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PD (WILLEM WANDIK, S.Sos):**

Pak ketua interupsi, minta waktu sedikit, mungkin 1 detik, karena sementara saya mau tinggalkan ruangan, ada hal yang perlu saya sampaikan, baik, ya belum lama ini dalam rangka jalankan fungsi pengawasan dan juga dalam rangka mendukung agenda besar Presiden Jokowi tentang nawacita, kami juga telah melakukan kunjungan di beberapa kawasan, saya kira kawasan itu merupakan kawasan strategis yang akan mengkoneksi akses kesejumlah kabupaten kota, dalam hal ini telah kami tinjau kawasan kabupaten Pacitan, untuk itu pada kesempatan ini kami mengusulkan kepada mitra untuk melakukan studi kelayakan dimana kawasan ini akan dijadikan pelabuhan, kepentingan pembangunan disana, yaitu pelabuhan Enggolan, dan kami harap dengan dibangunnya pelabuhan disana bisa mengekspor dan mengimport berbagai sumber daya alam yang ada disana dan juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat disana.

Berikut, pelabuhan..

**KETUA RAPAT:**

Ini baru lagi ini, sebentar saya kasih ya, supaya semua dapat dulu pak, Bakri ini masih 6 tadi kita sepakat jam 4 kita selesai, untuk itu kita tambah sampai jam 5 ya, jangan lewat jam 5 lagi, ini pak Bakri, silakan pak.

**F-PAN (H. A. BAKRI H.M., S.E.):**

**Baik terima kasih.**

**Pak ketua, pak Menteri yang saya hormati.**

**Para Dirjen yang saya banggakan.**

**Pimpinan Komisi V DPR RI.**

**Para rekan-rekan Komisi V DPR RI yang saya hormati.**

Pertama saya menyoroti masalah di laut itu di Jambi ada pembangunan pelabuhan (rekaman tidak jelas) jadi akses jalan ke Muara Saba sudah hampir mau selesai, arah menuju kesana itu 2019 akan dimulai, pelabuhan ujung jagung sepertinya kalau dilihat seperti terhenti, saya ingin mungkin bisa menjadi prioritas di tahun 2019 yang akan datang, karean bagaimanapun juga dipelabuhan yang ada di Provinsi Jambi, pelabuhan ujung jagung inilah yang masuk daftar buku kalau tidak salah di kementerian perhubungan, dan pelabuhan ini pelabuhan yang sangat strategi, ini mohon kiranya menjadi perhatian karena selama ini anggarannya 10,15,20,30, tidak clear pak, sehingga orang-orang sana, masyarakat sana berpikir bahwa ini sepertinya mangkrak, saya selaku anggota DPR RI Komisi V DPR RI capek

juga pak nerangin itu pak, karena anggarannya sedikit-sedikit, mungkin pak Mneteri bisa mengalokasikan anggaran cukup besar, terkait masalah ini.

Itu yang pertama, yang kedua didarat, sama beberapa dapil daerah pemilihan kami di Jambi yang akan kami serahkan pak Menteri yaitu adanya pembangunan halte di beberapa kabupaten, kalau saya mungkin akan saya sampaikan secara tertulis, pak Direktur atau pak Dirjen, yang kedua adalah Jambi ini adalah kemarin kira-kira seminggu yang lalu, saya ketemu dengan Setda, Setda bilang bahwa sepeda singkarak itu pak, atau apa, itu akan masuk ke Krinci sampai ke Krinci, jadi mungkin perlu perhatian rambu lalu lintas karena bagaimapun juga ini bisa mendatangkan .. ke provinsi Jambi, itu masalah rambu-rambu lalu lintas, yang kedua, di uara di provinsi Jambi saya mohon perhatian bandara muara bungo sampai hari ini juga masih juga anggarannya netes-netes. Ini mungkin pimpinan yang terakhir menyampaikan terkait dengan, ini sebenarnya sudah lama ini, ke pak Dirjen pak Menteri sudah saya sampaikan, adanya kapal sejenis kapal penyebrangan sejenis fery itu pak, yang banyak sekarang keluar dari Batam, Batam menuju ke Kuala Enok, langsung ke kota Kijang, nah ini kapal-kapal ini boleh dikatakan tidak punya data surat-surat resmi pak, rutenya ini Guntung Kuala Enok, pulau Kijang, kota baru ini, ini keluarnya dari Batam.

Sebagai contoh misalnya SBS yang run, ini sudah sering saya sampaikan, tetapi kemarin terjadi adanya kapal jenis ini tenggelam, itu keluarnya dari Batam, terus keluar dari Batam itu yang sepertinya mereka tidak punya surat-surat sehingga mereka keluar dari pelabuhan-pelabuhan tikus, ini mungkin menjadi perhatian, karena bagaimanapun juga kita takut di kemudian hari nanti, adanya kapal-kapal atau feri-feri ini yang tenggelam, itu namanya SB ocean run, rutenya guntung kuala enok pulau kijang, kota baru, keluarnya dari Batam pak, ini memuat penumpang itu 60 sampai 100, peralatan keselamatannya tidak, saya punya dokumen lengkap, saya punya foto lengkap, itu mungkin pak Menteri dari saya, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Bakri, pak Sahat siap-siap ibu Hanna.

#### **F-P. NASDEM (SAHAT SILABAN):**

**Terima kasih pimpinan.**

**Yang saya hormati ketua Komisi V DPR RI beserta pimpinan.**

**Yang saya hormati Bapak Ibu sesama anggota Komisi V DPR RI.**

**Yang saya hormati bapak Menteri Perhubungan.**

**Pak Dirjen Perhubungan Darat.**

**Pak Sekjen.**

## **Dan Bapak Ibu jajaran kementerian Perhubungan.**

Kalau tadi pak yang dair Demokrat, pak Jhoni Allen sudah menyampaikan sebagian barangkali yang harusnya saya sampaikan, bahwa kita belajar dari hal-hal yang sudah lalu, kejadian-kejadian beberapa bulan yang lalu, dimana kejadian yang sangat memprihatinkan di Danau Toba tentang kapal sinar bangun, ketika itu sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan dimana salah satu destinasi prioritas pertama barangkali, Danau Toba karena sudah dinyatakan terindah panoramanya di dunia, bahkan terbesar nomor 2 di dunia, tetapi ada kapal tenggelam, tenggelamnya karena sangat tidak masuk akal, dimana tenggelam kapal kecil begitu yang seharusnya 43 orang, bisa dimuat tetapi ternyata akhirnya sampai 200 orang bahkan 70 unit motor itu kira-kira yang kita dengar, dalam hal ini saya hanya mengingatkan pak Menteri supaya jangan terulang lagi di kemudian hari, alangkah baiknya disana ada Syah Bandar, supaya jelas SOP nya, jangan kemarin waktu kami kunjungan spesifik mesti jelas tunjukan KTP, kita seterusnya peraturan itu diperketat supaya jangan terjadi hal-hal sesudah itu sampai sekarang tidak tahu 200 orang yang belum ketemu mayat yang meninggal disana, terus yang saya dengar juga disana, ada 400 unit kapal, tetapi satupun kalangan kapal tidak ada, untuk itu saya pikir dari kementerian perhubungan alangkah bisa menerangkan kepada Pemerintah setempat supaya disana ada BUMD khusus untuk perbaikan kapal dimaksud tadi, sangat memprihatinkan kalau sampai 400 kapal tetapi satupun disana tidak ada galangan kapal.

Terima kasih pak Menteri bahwasannya tadi apa yang dimaksud oleh pak Jhony alen disana saya dengar sudah ada kapal ro-ro, yang cukup besar, kita pertama-tama mengucapkan terima kasih karean Pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan memprehatikan Danau Toba.

Danau Toba ini ada 7 kabupaten daratnya yang masuk ke Danau Toba itu pak Menteri, bapak juga pasti tahulah, kalau kita sebenarnya seperti yang dibilang pak Jhony Allen tadi tidak perlu kapal yang terlalu besar disana, hanya adalah sebagai percontohan paling tidak setiap kabupaten memiliki kapal supaya masyarakat kita meniru dan mencontoh Pemerintah yang akan mengarahkan mereka kearah yang lebih bagus, kalau kita maupak sebenarnya maaf-maaf ini, tenggelamnya kapal sinar bangun itu, itukan mereka hanya mengejar setoran tetapi korban jiwa, yang ratusan orang, jadi kalau tidak diatur oleh aturan main, SOP itu yaitu mereka selalu mengejar target, mengejar setoran, akibatnya dirakyat juga, untuk itu harapan kami pak Menteri, karean ini sudah dinyatakan menjadi destinasi diantara 3 besar, harapan kami terwujudlah danau toba menjadi destinasi yang berdampak positif.

Kami dengar juga pak Menteri sudah membangun 5 dermaga disana, kurang lebih dinilai 300 milyar, terima kasih pak Menteri. Tetapi dari dulu itu harapan saya kalau bisa dermaga disana itu ada minimal, artinya standar minimal untuk menarik wisatawan kesana, tentu kita tahu percis bahwa negara kita ini mayoritas muslim, kalau sarana prasarananya kita siapkan, karena kita tahu persis dari muslim 5 kali sholat setiap hari.

Jadi dermaga itu harus membuat daya tarik supaya wisata-wisata kesana itu tidak bosan, kira-kira itu harapan kami masyarakat disana pak Menteri, kemudian sedikit lagi pak ketua setelah dikasih kapal tadi kapal ro-ro, disebut namanya ihan papak, tetapi ada lagi dibawahnya belawan ini menjadi pertanyaan buat masyarakat disana pak, karena hubungan danau toba dengan belawak sebenarnya tidak ada, harapannya kalau bisa pak Menteri harapan masyarakat disana karena ini menjadi di medsos sudah mulai beredar, bisalah ini disebut Ihan Batak Danau Tobam itu kira-kira usulan dari komunitas yang tinggal dikawasan danau toba itu pak Menteri.

Harapannya begitu jadi saya kira tidak, panjang lebar lagi, hanya saja seperti yang disampaikan oleh pak... tadi bahwa saya mungkin sudah di ecek-ecek ya, natnilah saya mungkin banyak yang saya lihat, saya mulai turun ke pinggiran kepulauan seribu sana, tetapi nanti di jajaran Eselon I nanti kita bangun dermaga-dermaga diantara mau teluk naga dan... terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Hanna Gayatri, siap-siap pak Henky.

#### **F-PAN (HANNA GAYATRI, S.H.):**

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**Yang saya hormati bapak Menteri Perhubungan beserta jajaran.**

**Bapak ketua dan wakil ketua beserta teman-teman Komisi V DPR RI yang saya kasihi.**

**Selamat sore.**

Dalam kunjungan Dapil minggu lalu atau 10 hari yang lalu ke kabupaten Ogan selatan, dalam pertemuan tersebut saya bertemu dengan Bupati Ogan Selatan, dalam pertemuannya itu menanyakan pengajuan penetapan lokasi bandar udara yang sudah diajukan sejak tahun lalu, menurut hemat kami dalam rangka menunjang pariwisata ada di daerah tersebut yaitu terutama danau ranau yang terus berkembang sudah selayaknya penetapan tersebut dapat direalisasikan, disamping itu adanya pembangunan bendungan yang luasnya sama dengan waduk jatiluhur sehingga dapat mempercepat mobilisasi tenaga ahli dari daerah tersebut ke Palembang yang berjarak 225 km atau ditempuh dalam 7 jam perjalanan ke Palembang, pembangunan tersebut dikarenakan tahun depan dan saat itu sudah tender, pertanyaan saya mengapa sampai saat ini belum dikeluarkan penetapan lokasi bandar udara agung, mengingat bandaranya sudah ada dan pernah dijadikan bandara perintis oleh Gubernur yang sesudah Gubernur sekarang 15 tahun yang lalu, apabila memang memungkinkan kiranya bapak

Menteri dapat mempercepat penetapan bandar udara tersebut, terima kasih,  
*Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

Dan saya akan memberikan surat pengajuan dari Bupati Ogan Selatan kepada bapak Menteri sekarang, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (Drs. HENKY KURNIADI,SH,MH):**

Terima kasih pak.

***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.***

**Pak Menteri beserta jajarannya serta rekan-rekan Komisi V DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan.**

Tadi sudah banyak yang disampaikan saya hanya sisa-sisa saja, saya melihat Menteri inikan ibaratnya CEO kalau satu perusahaan, jadi saya sangat mengapresiasi tadi ada beberapa pembiayaan yang diluar APBN karena kalau semata-mata hanya meminta dari APBN itu seolah-olah kurang kreatif tetapi kalau seorang CEO itu justru harus bisa menciptakan pembiayaan-pembiayaan untuk institusinya, saya sangat apresiasi sekali, tetapi disini ada terbatas ya KPPU KSP mungkin bisa dikembangkan model lainnya dan lebih mendalam, sebagaimana kita mengetahui bahwa ada rencana misalnya dari Kemenkeu pada sekitar 2015 yang lalu mengenai redenominasi rupiah, tetapi bagaimana redenominasi rupiah ini tidak seperti sumary tidak membuat satu syok dipasar, jadi ini merupakan satu simulasi yang bertahun-tahun semua dipikirkan secara mendalam dan yang paling efektif adalah kalau pada masa awal-awal Pemerintah bukan pada masa akhir.

Karena disini perlu masa waktu 5 tahun, seperti contoh disinikan pemikiran yang sangat mendalam, jadi sepanjang itu untuk kepentingan nasional saya pikir terus saja berlangsung karena kalau menghimpun dana apalagi dari masyarakat ini justru penting, justru membuat masyarakat ikut berpartisipasi, saya melihat partisipasi masyarakat ini sangat luar biasa, misalnya dari PUPR ini ada beberapa program-program yang diberikan kepada masyarakat, misalnya BISO, BSPS itu yang membangun adalah warga desa setempat bukan dicarikan kontraktor dari luar, hasilnya selama saya mengecek di show irigasi BSBS yang diberikan merupakan dana yang dikerjakan masyarakat, hasilnya jauh lebih bagus kalau dicarikan faktor dari luar.

Misalkan targetnya 450 meter selalu melebihi target ini membuktikan kekuatan masyarakat luar biasa, kalau kita bersama masyarakat luar biasa, jadi kalau kita menghimpun dana dari masyarakat sepanjang itu adalah warga negara republik Indonesia untuk pembiayaan kita, saya pikir ini tidak ada salahnya karena Jerman itu juga hutangnya besar tetapi hutang pada rakyat itu sendiri, Jepang juga hutangnya jauh lebih besar daripada kita, karena hutang pada rakyatnya sendiri.

Surabaya, Surabaya ada rencana mau bikin.... Dan sebagainya, kalau itu bisa menghimpun dana dari masyarakat surabaya sendiri sebagai salah satu pemilik saham dari suatu infrastruktur perhubungan ini luar biasa, saya pikir ini perlu dikembangkan pak Menteri yang model seperti ini ini perlu dikembangkan, saya melihat ada suatu kreatifitas disini untuk menciptakan pendanaan yang baru.

Sekarang ini kan memasuki era modern ya jadi mulai sekarang pembelanjaan itu mulai mengganti hal-hal yang sifatnya lebih modern, katakanlah misalnya di Dirjen Perhubungan Darat, saya melihat ini paling kasihan pak, karena dananya tidak sampai 4 trilyun padahal ini banyak yang dikerjakan, jadi mulai sekarang mulai kalau misalnya penggantian itu perlu otomatic trafic light perlu sekarang pak, karena tidak mungkin kita itu trafic light itu yang sudah paten 3 menit, kemudian jalan 3 menit merah, itu tidak mungkin, harus otomatic melihat situasi volume mobil, jadi kalau misalnya kosong ya terus hijau, otomatic trafic light, berada diluar negeri.

Kemudian kalau di kereta api saya melihat juga banyak barang-barang yang out off date padahal kereta ini perlu untuk akselerasinya, jadi katakanlah misalnya kalau sekarang itu teknik menghaluskan rel itu sudah ditinggal granding itu, sudah CNC jadi ini perlu ada suatu moderinsasi alat, seperti ini, kemudian yang di bandara-bandara saya melihat kalau pemeriksaan KTP itu kalau saya ke Halim itu sampai 3 kali, kita masuk mendapatkan tiket periksa KTP kemudian masuk keruangan ini periksa KTP mau masuk pesawat periksa KTP sampai tiga kali apakah tidak bisa dibuat cukup 1 kali, sehingga akses masuk ke Bandara ini supaya lebih cepat, jadi saya mengingat ketika jaman dulu di jalan tol belum diterpkan etol itu sulit, karena habit masyarakat sulit dirubah, semua kebiasaan dengan membayar rupiah tetapi sekarang kalau sudah setahun berjalan e-tol coba kembalikan orang bayar pakai rupiah pasti juga masyarakat tidak tahu, karena sudah terbiasa dengan e-tol, jadi sistem ini juga penting untuk kita simulasikan mana yang paling efektif tidak menimbulkan kehebohan tetapi bisa efisien, kalau pemeriksaan barang saya oke dua kali, karena saya melihat disini kemampuan atau kualitas petugas yang memeriksa kadang kala masih meragukan, jadi pemreiksaan perlu dua kali jadi barang itu perlu pemeriksaan untuk keselamatan penumpang, tetapi kalau KTP sampai 3 kali ini menurut saya membuang-buang waktu, penumpangnya juga capek sistem antriannya juga panjang, jadi kita harus mengefisienkan setiap sistem-sistem yang memang tidak efisien, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, pak Gatot, siap-siap pak Alex masih ada dua lagi.

**F-PG (Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si):**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pak ketua, pimpinan Komisi V DPR RI dan anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami cintai.**

**Pak Menteri dengan seluruh bapak Dirjen yang hadir darat laut dan kerta api dan seluruh jajaran kepala dan staf dari kementerian Perhubungan yang kami hormati.**

Saya mencermati kawan-kawan tadi sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan apa memberikan pandangan-pandangan terhadap untuk kebaikan dan kemajuan Menteri perhubungan didalam kinerjanya didalam publik service brangkali. Saya melihat bahwa memang untuk melaksanakan nawacita pak Jokowi yang luar biasa itu sebetulnya kementerian yang bisa menghubungkan antara sabang sampai merauke itu adalah Kemenhub dan PUPR itu bukan berarti bahwa kementerian yang lain tidak penting tetapi saya melihat adalah itu adalah Menteri yang memang kinerjanya sangat terlihat dalam rangka untuk cikra dan nawacita itu sendiri, pak Menteri tadi catatan-catatna sudah disampaikan baik laut dan udara memang menginginkan pelayanan publik service yang prima dan itu adalah dalam rencana aman kemudian nyaman begitu, bahkan zero accident dan itu adalah sebuah tantangan keinginan harapan kita semua dan itupun juga harapan masyarakat, tetapi saya melihat bahwa kekuatan APBN kita diatas 2000 sekian trilyun itu didalam penegasan penyampaian Presiden maupun Menteri keuangan ditegaskan berkali-kali bahwa sebaiknya ada belanja modal itu yang menjadi fokus apa namanya, penguatan didalam rangka untuk kekuatan perekonomian Indonesia kedepan, oleh karena itu saya melihat mencermati bahwa pak Menteri bahwa persoalan darat urusan darat itu saya pikir kendali untuk rekayasa lalu lintas didalam rangka untuk menghindari dan memperkecil (rekaman tidak jelas) persoalan muatan yang tidak terkendali sehingga berapapun yang dipasok di PUPR dalam rangka untuk memperbaiki jalan saya pikir itu akan sulit, jalan pasti bergelombang sisi lain penguasa pasti menginginkan bahwa bagaimana efisiensi dan untungnya itu tidak sedikit, itu yang menjadi pertimbangan, tetapi bagaimana untuk bisa mengendalikan ini, sisi lain adalah bagaimana roda dua yang sekarang ini sudah hampir luar biasa jumlahnya itu bisa dikendalikan dalam arti apakah rekayasa lalu lintas apakah melalui kebijakan regulasi yang sehingga kendali keseimbangan jumlah motor dan kendaraan ini juga bisa dikendalikan, itu menjadi penting.

Yang kemudian saya mencermati udara, saya pikir udara tadi banyak pendapat saran, kawan-kawan cukup baik bahkan bagaimana pelayanan udara karena tingkat kecelakaan udara sangat mengerikan, oleh karena itu bagaimana prosedur didalam rangka keberangkatan dan manajemen untuk



pengendalian penerbangan yang namanya bagaimana sistem apa, perhubungan udara sehingga itu pada posisi nyaman dan aman itu terpenuhi, disamping itu bagaimana performance kita dalam rangka memberikan pelayanan kepada udara itu karena udara katagori itu adalah performance kita secara internasional ini yang kadang-kadang pelayanan yang disebutkan pak Henky tadi adalah salah satu kenyamanan yang sedikit terganggu, tetapi itu merupakan prosedur karena tidak hanya apa, orang biasa aja tetapi orang luar biasa masuk X ray harus lepas semua, dalam rangka untuk kepentingan keselamatan.

Kemudian persoalan laut pak Menteri memang laut ini sesuatu yang harus diperhatikan betul, dan apa namanya prosedurnya bagaimana seperti halnya keamanannya seperti diudara ini nampaknya belum memenuhi standar itu, karena orang bisa ternyata kecelakaan yang ada itu kategori kalau tidak kapalnya yang insiden persoalan kapal maupun muatan berat, kendali ini mestinya sudah diantisipasi, kalau misalkan laut itu apa perlu dilakukan perbaikan manajemennya tetapi saya pikir saya melihat titik baik sekarang, laut ini sudah mulai berbenah, tetapi situasi kondisi di urusan laut ini memang luar biasa artinya peliknya persoalan, tetapi saya yakin dengan semangat dan tekad mudah-mudahan laut ini bisa betul-betul baik, prosedur untuk keberangkatan dan keamanan dan kenyamanan itu bisa diwujudkan, dan saya pikir urusan kereta api pak ini alternatif, perjalanan kita transportasi masal itu salah satunya adalah transportasi kereta api ini yang sangat prespektif dan menjanjikan, untuk itu kalau hari ini kita sama titip pandang kita bahwa bagaimana transportasi masal itu tingkat kenyamanan dan keamanan masyarakat itu diarahkan alternatifnya adalah kereta api, oleh karena itu keamanan dan kenyamanan itu perlu juga diwujudkan.

Pak Menteri yang sangat kami hormati dengan seluruh jajarannya.

Kami kemarin tanggal 2 April itu ini persoalan Dapil saya pak Menteri jadi bupati dengan DPRD datang kemari untuk menyampaikan beberapa persoalannya dan itu adalah wilayahnya di Pacitan, ini kawan-kawan yang kebetulan kemarin kunjungan spesifik di Pacitan itu sudah menyampaikan, DPR, pimpinan DPR dan bupati menyampaikan bahwa ada persoalan, bahwa ada investasi yang terbengkalai di Pacitan dan itu adalah persoalan adalah Dermaga itu terjadi disana, itu namanya Dermaga ... pak yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan, kami bisa melihat bagaimana Pemda itu sudah menyediakan persoalan pembebasan dan jalan itu sudah sampai ke Dermaga, dan kami sudah turun, sudah sampai ke dermaga dan saya melihat itu ...sudah hampir 30 milyar disitu, juga disitu bukan persoalan milyar kalau dihitung dengan APBN itu adalah sangat kecil, tetapi jangan sampai ada kesan bahwa Pemerintah yang terbengkalai itu menjadi potret yang tidak bagus. Oleh karena itu namanya perencanaan yang tidak bagus pada sisi lain bahwa yang namanya dermaga dengan terbangunnya yang namanya pelabuhan yang ad di Cilacap dan itu pelabuhan niaga disana, maka ada sebuah suasana baru, yang namanya bahwa masa depan selatan selatan itu lebih baik, saat inikan disparitas antara utara dan selatan itu jomplang pak Menteri, tingkat kehidupan masyarakatnya, oleh karenanya dengan adanya

dermaga Cilacap maka tol laut yang itu diharapkan ada selesainya itu adalah pelabuhan dan dermaga di Pacitan itu tidak membuka jalur Jawa Tengah, itu juga Yogyakarta, itu juga Jawa Timur.

Pelabuhan ini nampaknya perlu ada perubahan status hukum yang tadinya adalah didalam keputusan Menteri nomor KP4142013 status pelabuhan Pacitan adalah pelabuhan pengumpul, tetapi dalam perubahannya, itu diterbitkannya keputusan peraturan Menteri, keputusan Menteri perhubungan 901 2016 menjadi turun menjadi pelabuhan pengumpan lokal. Dengan posisi ini antara yang namanya PUPR dengan posisi kepastian Dirjen atau perhubungan laut, itu dalam petik belum ada kejelasan, oleh karean itu pak Menteri karean itu adalah sangat strategik didalam rangka mewujudkan tol laut dalam rangka untuk keseimbangan antara selatan-selatan dan Jawa bagian utara, itu sebaiknya proyek ini diteruskan, saya coba kordinasi karena kemarin kami juga ada staf dari bapak, yang ikut, jajaran dari perhubungan laut dan Menteri PUPR, melihat catatannya, kalau pembangunan ini sudah dilakukan tiga tahap tetapi berhenti oleh karean itu mohon diteruskan pak Menteri dalam rangka untuk bisa terwujudnya dermaga dan kemanfaatan tidak hanya Pacitan tetapi daerah disekitarnya.

Saya pikir itu karena saya harus menyuarakan ini karean saya Jatim 7 dan wilayah Pacitan adalah bagian dari Dapil 7 teirma kasih, *Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih jadi natni yang berkunjung ke Pacitan bisa bahas lebih dalam lagi dengan Kementerian Perhubungan Laut, pak Alex, siap-siap bu Novi, pak Irmawan, dan pak Anton Sihombing.

Pak Alex silakan pak.

#### **F-PDIP (ALEX INDRA LUKMAN):**

**Terima kasih pak ketua.**

***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.***

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan Komisi V DPR RI.**

**Pak Menteri beserta jajaran, saya usahakan sesingkat mungkin.**

Yang pertama, pak Menteri saya ingin bertanya terkait dengan nomenklatur penganggaran di kementerian perhubungan, apakah ini sudah menjadi kebijakan kementerian keuangan atau ini menjadi kreatifitas dari kementerian perhubungan, karean saya baca disini mulai ada judul baru, terkait belanja barang mengikat dan tidak mengikat.

Dimana inipun dibagi di dua cluster yang berbeda yaitu operasional dan non operasional, kalau memang ini menjadi kebijakan dari kementerian keuangan tidak usah diperpanjang, tetapi kalau kemudian ini adalah nomenklatur penganggaran yang baru dari kementerian Perhubungan saya mohon di jelaskan.

Yang kedua, terkait BLU, saya mengapresiasi yang pertama PNB yang meningkat tajam tahun 2017 itu, tahun 2017 ke 2018 itu selisihnya tidak banyak 1,3 trilyun menjadi 1,39 trilyun, tetapi tahun 2019 ini in menjadi satu 1,88 trilyun. Pertanyaannya adalah di BLU ini pak, ini BLU ini tahun 2017 itu 1 trilyun tahun 2018 meningkat menjadi 1,7 tetapi di 2019 menurun menjadi 1,5 trilyun, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu.

Yang ketiga saya ingin menyampaikan bahwa rapat ini tidak berdiri sendiri, rapat ini dimulai terkait anggaran APBN tahun 2019 maka ini akan saling terkait, dari rapat yang pertama pembahasan dulu sampai sekarang, sampai nanti ketok palu persetujuan di Paripurna, pada rapat Rabu 4 Juli 2018 kita membuat kesimpulan rapat terkait dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dimana pagunya itu adalah 3,7 trilyun lebih, disana dipoint berikutnya catatan meminta penambahan, memintan penambahan anggaran untuk perhubungan darat, terkait keselamatan dan kenyamanan transportasi darat clear itu point khusus satu sendiri.

Tetapi hari ini dari presentasi ini yang kita baca adalah Direktorat Perhubungan Darat ini malah mengalami penurunan, dari 3,7 menjadi 3,6 trilyun jadi saya mohon penjelasan dari pak Menteri, apakah kemudian dengan pengurangan bisa mengakomodasi kesimpulan rapat pada tanggal 4 Juli 2018 tersebut terkait dengan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat, terima kasih pimpinan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Menteri saya kira catatan terakhir dari pak Alex itu penitng pak, itu juga masuk dari bagian pembahasan kita di kesimpulan untuk memikirkan berkaitan dengan safety dan security, keselamatan dan keamanan.

(rekaman tidak jelas)

Itu masih dalam bagian yang kita simpulkan, untuk itu kemarin kita belum setuju ini berkaitan dengan anggaran barang (rekaman tidak jelas) untuk itu maka kita mau minta terobosannya ini apa pak, berkaitan dengan kebutuhan dari kesimpulan kita khususnya darat kemarin.

Masih ada tiga mudah-mudahan bisa dimanfaatkan waktunya ibu Novi biasanya tidak lama-lama terus pak... karena mau ke Kalteng jadi tidak lama-lama, pak Irmawan biasanya cepat, ini biasanya pak Anton, silakan ibu Novi.

#### **F-P.GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM):**

Terima kasih pimpinan, saya tidak suka lama-lama, cape kalau lama, iya, tadi pak Alex bilang tidak suka yang panjang sama lebar, kalau itu beda pak sama saya.

Pak ketua, pimpinan, wakil, anggota yang saya hormati, pak Menteri dan ajajaran semua yang saya hormati.

Pak Menteri dan jajaran saya langsung saja, sekilas tadi saya terlambat jadi tidak mendengarkan paparan, tadi saya ingin mendengarkan beberapa hal langsung saja, saya teringat kereta api Jakarta Bandung itu perkembangannya bagaimana, apakah jadi atau ngak, kemudian mengenai kereta api banyak sekali kecelakaan saya setiap pembahasan rapat dengan mitra dengan bapak mungkin selalu menyampaikan begitu banyaknya kecelakaan, apalagi terkahir kemarin banyak sekali kecelakaan yang ada di kereta api mohon ada rumusan yang serius, walaupun itu mungkin bukan ranahnya kementerian, itu Dirjen darat, tetapi ini sangat penting karean apa, karean ini menyangkut nyawa manusia, jadi buat saya ini adalah prioritas kalau dibahas dengan kementerian dengan provinsi dengan kabupaten ini disinergikan bagaimana formulasinya supaya kecelakaan itu tidak semakin banyak dan berulang, apalagi banyak sekali rel kereta api yang tidak bertalang, kebijakan itu yang sangat saya harapkan menjadi kebijakan nasional mengenai yang tidak kepalang itu, rel kereta yang tidak kepalang pintu.

Kemudian mengenai dapil saya mungkin loncat-loncat purbalingga itu yang wirawaba bandara pak, saya ingin tahu itu kejelasannya apakah berjalan, kemudian kalau berjalan bisa beroperasi tahun berapa, karena purbalingga kalaupun bukan batu tetapi itu dapil tetangga saya dan sangat dekat dengan daerah saya, saya Cilacap. Satu kampung dengan pak Dirjen darat, kemudian yang berikutnya mengenai tadi sekilas tentang jembatan timbang, mengenai kelebihan muatna, saya ingin mengetahui sampai terakhir ini kebijakan apa yang dibuat jembatan timbang, apakah sudah dibuka semua tau Undang-undangnya tidak diberlakukan dengan aturan yang berlaku, karena saya tahu konsekuensinya sangat berat karena satu kendaraan melebihi tonasi kemudian ditilang pasti sangat memutuhkan banyak isntrumen seperti gudang, seperti (rekaman tidak jelas) saya ingin tanyakan itu, terakhir ini, jembatan apa yang dibuat mengenai jembatan timbang.

Karean ini juga menyangkut keselamatan nyawa manusia di jalan raya, dan juga tidak hanya itu mengenai jalan raya yang tidak mudahnya cepat rusak, kemudian mengenai mungkin terkahir ini stasiun di banyumas pak, saya kemarin ke stasiun banyumas, stasiun banyumas itu sangat padat, jadi kepala stasiunnya mengusulkan dan berharap stasiun tersebtu diperluas, mungkin diperbaharui diperluas, karena titik penumpangnya sudah numpuk, untuk tempat duduk tadi menunggu saja sudah (rekaman tidak jelas).

Jadi mohon itu bisa di perhatikan di Kabupaten Banyumas, jadi mohon yang terakhir, mohon kordinasi dengan PU mengenai perlintasai kereta api yang ada jalan rayanya karena di Kroya kemudian di Rawalo itu sudah macetnya minta ampun, apalagi sekarang sudah dibangun double track di Rawalo Cilacap itu panjangnya minta ampun, jadi mohon ada korndasi dengan PU mengenai fly over yang ada di Kroya dan Rawalo, saya ini sudah

sangat .. karena macetnya panjang sekali, demikian dari saya, terima kasih pimpinan.

*Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Pak Rahmat Nasution.

**F-PDIP (Dr. H. RAHMAT NASUTION HAMKA, SH., M. Si.):**

**Terima kasih pimpinan.**

**Singkat saja langsung kepada bapak Menteri dan seluruh jajarannya.**

Mungkin pertama untuk perhubungan darat yang kami sampaikan, terkait dengan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di lingkup jalan nasional pak, jalan trans Kalimantan poros Selatan itu alhamdulillah sudah baik dan bagus, dan kemudian juga sangat menunjang menuju sampai ke Kalbar Pontianak pak, jadi jalan Kalimantan poros selatan itu gelap, sangat gelap sekali dilintasannya, kami berharap mungkin pada jajaran kementerian untuk dapat memberikan prioritas pada pemasangan lampu penerangan jalan, minimal desa-desa yang dilintasi daripada jalan trans kalimantan poros selatan itu juga dia merasakan sedikit, baru ada 4 kehidupan, mulai ada tanda-tanda cahaya kehidupan disana, jadi ini menurut kami perlu ditunjang, karena dia sudah sangat bagus jalannya sudah sangat layak, untuk itulah maka kami di kalimantan berharap nanti melalui Komisi V DPR RI jalan trans Kalimantan poros utara yang nantinya akan kita tinjau yang belum mendapat sentuhan, tetapi juga diharapkan dari perhubungan darat juga dipersiapkan fasilitas alat rambu-rambu lalu lintasnya juga saya pikir ini supaya sinergi untuk kedepan, selanjutnya pak kami berharap untuk pengadaan bus sekolah coba kita sedikit kaji dan evaluasi, untuk pengadaan bus sekolah ini coba sedikit kaji dan evaluasi karena juga kadang-kadang bahwa sistem zona sekolah itu kan sudah sistem zona pak penerimaan sekolah itu sudah sistem zona, zonanya itu kepada masyarakat yang berada diwilayah sekolah itu sendiri penduduknya yang diprioritaskan, sehingga masalah transportasi itu bukn masalah yang sangat crucial sebenarnya, tetapi dievaluasi, karena seperti tahun kemarin dengar-dengar dari teman-teman juga belum terealisasi dengan baik begitu, jadi saya pikir untuk 2019 ini apakah tidak ada alternatif program lain sehingga nantinya juga bisa membantu program Pemerintah, dan saya juga berharap kalau bisa kemarin pak Jokowi pernah datang ke pameran otomotif yang ada di Tangerang bahwa beliau melihat ada mobil angkutan pedesaan.

Jadi ini kenapa tidak direspon daripada kementerian untuk melihat itu, ya minimal pilot project itu dululah beberapa begitu sehingga kita lihat bahwa

angkutan pedesaan itu bisa berjalan dengan baik, juga harganya tidak seberapa juga, lalu kemudian juga bahwa ini saya dengar sudah akan diproduksi masal jadi tahun ini juga, jadi sehingga apa, ada gairahh, ada gairah daripada industri otomotif juga, dan lagi kandungan-kandungannya juga banyak kandungan lokal bapak, dalam negeri.

Jadi itu kepada kementerian supaya mendapat perhatian dari apa namanya perhubungan darat, dan selanjutnya untuk perhubungan udara ini bandara Cilik Riwut itu katanya apalagi dalam pemaparan tadi akan dikerjasamakan, di KSP kan tetapi kami berharap jangan sampai nanti hanya karena ingin di KSP kan tetapi untuk sarana penunjang untuk kesiapan bandara untuk operasional awal 2019 ini agak sedikit terganggu, karena saya kemarin baru 2019 ini, ini agak sedikit terganggu, karena saya kemarin baru kunjungan reses secara pribadi ke bandara cilik riwut secara pribadi, reses perorangan kunjungan dapil, kalau bisa di operasionalkan awal 2019 tetapi dengan minimal dengan syarat yang minimal tetapi dengan syarat yang minimal, tetapi kita berharap janganlah kalau bisa ya bisa memenuhi standar yang memang diperlukan, dan ingin mengetahui sejauh apa KSP itu ada dan ini juga penting, dan memang masih bisa di ... sebagai UPT sampai dia siap laik sebenarnya saya pikir tidak masalah juga, tetap saja dipertahankan sebagai UPT misalnya, kalau memang pemikiran kementerian lain ya kita juga berharap jangan mengganggu operasional awal tahun 2019, supaya tidak menjadi hutang pak.

Dari 10 bandara itu, jadi tinggal bandara cilik riwut yang menunggu eksekusi, dan selanjutnya mengingatkan bandara iskandar pangkalan BUN pak, sudah sangat luar biasa tingkat keramaiannya dan kalau bisa dipikirkan sudah kita siapkan pak, bandara pengganti bandara untuk pengganti yang ada itu yang lebih baik yang layak dan lebih besar, sehingga bisa dimiliki oleh kementerian perhubungan.

Dan lahanya sudah kita siapkan, tinggal menunggu persetujuan, tinggal menunggu studi kelayakan dan sebagainya, untuk itulah maka bandara pangkalan bun ini semenara kalau bisa pak jangan diperpanjang dulu landasannya, inikan mau diperpanjang dulu landasannya tetapi yang paling penting itu adalah perluasan upronya, kemudian over runwaynya dan pembuatan taxi waynya itu yang sebenarnya sangat dibutuhkan sekarang, tetapi dalam rangka menunjang, tetapi kalau nantinya hanya yang berbadan lebar yang masuk, dan malah nanti mematikan lagi pesawat-pesawat yang sudah merintis selama ini, ya malah tidak efektif lagi pak, malah bukan menambah kebaikan, jadi kami berharap tolong dievaluasi mengenai perpanjangan itu, selanjutnya mengenai bus tadi pak coba di evaluasi karean sekarang ini sistem sekolah sudah pakai zona, zonanya itu orang disekitar lingkungan sekolah itulah yang diterima tidak ada orang dari kecamatan ujung kampung sana dibawa kesana, itupun kalau ada beberapa, pasti mereka punya kendaraan dan sebagainya, jadi bukan berarti zona disekolah itu tidak penting, tetapi maksud saya kita kaji, jangan ... kalau bisa mobil angkutan pedesaan kita coba pilot project tahun 2019 ini, supaya benar-benar langsung menyentuk pada kepentingan masyarakat.

Saya pikir itulah beberapa hal, dan saya pikir untuk perhubungan laut ASDP ini ... dermaga penyebrangan, ini katanya belum masuk renstra

kementerian ya saya berharap bisa dimasukan pak dalam renstra kementerian perhubungan, kemudian dermaga penyebrangan sizura yang merupakan sentra perikanan di kabupaten kota waringin timur.

Dan terlebih penting lagi pak jaket safety jaket pelampung kalau bisa diadakan banyak dibagi-bagikan kepada para nelayan, dibagikan kepada para angkatan sungai yang ada di Kalimantan, karena di Kalimantan itu angkutan sungainya banyak pak, jadi perlu juga dibagikan jaket pelampung untuk keamanan, dan selanjutnya yang paling penting lagi selain rambu didarat rambu-rambu disungai pak, jadi rambu-rambu disungai juga harus mendapatkan perhatian dan mudah-mudahan dapat dianggarkan di 2019 ini khususnya dijalur sungai yang besar-besar yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan tengah, terima kasih pak.

*Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak.

Selanjutnya pak Irmawan, dan pak Anthon Sihombing.

#### **F-PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**Yang kami hormati pimpinan.**

**Teman-teman anggota Komisi V DPR RI.**

**Pak Menteri beserta jajarannya.**

Saya singkat saja ini pak, pertama saya ingin mempertanyakan kembali pak, yang disampaikan pak Willem tadi, sehubungan dengan pengadaan bus pak, apakah memang ada janjinya karena kami sudah terlanjur janji, kalau saya tidak salah saya janjikan ke kabupaten (rekaman tidak jelas) jadi kalau memang ini ada kira-kira kapan realisasinya, kalau memang ini ada kapan realisasinya, kalau tidak ada kita buat janji lagi kedepan pak, itu satu pak.

Kemudian, terkait dengan anggaran 2019 ini 41T anggaran perhubungan, saya berharap bisa di prioritaskan untuk Aceh pak, karena di Aceh itu masih banyak persoalan perhubungan yang belum terselesaikan, baik darat, laut dan sebagainya.

Perhubungan darat misalnya pak, disana jalan nasional sudah bagus, tetapi kondisi jalannya yang dipegunungan tidak ada rambu-rambu pak, jadi oleh karena itu kita berharap kedepan ini bisa di adakan untuk rambu-rambu jalan di Aceh pak, kemudian saya menanyakan pak di Aceh juga pernah

dibangun kereta api, yang (rekaman tidak jelas) dan dulu sudah pernah terealisasi pak, sudah jalan sampai hari ini kereta apinya sudah hilang dan bagaimana kelanjutan, apakah masih dilanjutkan atau bagaimana pak, kemudian selanjutnya pak di Aceh juga ada pulau terluar, disitu juga dibutuhkan kapal penyebrangan pak, jadi kita berharap dari kementerian perhubungan bisa mengalokasikan untk penyebrangan pak, selanjutnya barangkali dalam waktu dekat ini, kami ada kunjungan dari Komisi V DPR RI ke pulau... kami berharap dari kementerian ini bisa mendampingi kami pak dari masing-masing Dirjennya sehingga kunjungan ini bisa fiktif dan bisa bermanfaat dari masyarakat yang disana.

Terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Irmawan, silakan pak Anthon.

### **F-PG (Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING):**

Terima kasih pimpinan.

***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.***

**Termasuk Menteri dan seluruh Eselon I yang saya hormati.**

Yang saya hormati, seluruh anggota keluarga besar Komisi V DPR RI, beberapa hari yang lalu ada 80 orang kemari nahkoda perwira perairan memberikan petisi ke Presiden tetapi selaku mitra Komisi V DPR RI kita tidak biasa, dan kalau saya terangkan disini memakan waktu setengah jam, tetapi nanti akan kami bahas, atau akan kami sampaikan ke Dirjen Perhubungan Laut terutama satu, kalau ada kecelakaan kapal itu kenapa polisi yang memeriksa kehutanan sedangkan di Undang-undang nomor 17 tahun 2018 itu adalah domain syahbandar, disamping itu juga ada mahkamah pelayaran kita, seperti saya dulu pernah tenggelam, kapal saya di pacifik, kapal bendera Singapur, saya berangkat dari Taiwan, saya disidang Mahkamah Perairan Taiwan, kejadian di Perairan Jepang, saya disidang mahkamah saya di Perairan Jepang.

Bendera saya bendera kapal Singapur, saya disidang di kapal Sungapura, saya selaku bangsa Indonesia saya disidang Mahkamah Perairan Indonesia, jadi jangan polisi semua.

Sama itu dengan sekarang kepala desa itu takut menerima dana-dana Indonesia karena polisi semua yang memeriksa lebih takut sekarang kepala desa ke polisi daripada ke Bupati apalagi ke Camat, itulah kondisi sekarang.

Itulah mengenai apa, mengenai bpsdm secara lisan, saya sudah ngobrol apa itu petisi yang (rekaman tidak jelas) selaku kita bermitra kita harus isolasi mana yang perlu mana yang tidak perlu, terus untuk Dirjen



Perhubungan Darat, dari tadi saya amati kok iya kecil banget anggaran di (rekaman tidak jelas) padahal ya sekjennya mantan Dirjen Perhubungan Darat, (rekaman tidak jelas).

Terutama mengeai pak Dirjen Siantar itu terminal busnya, itukan tidak besar-besar sekali, kita sudah melihat kesana dan pelabuhan (rekaman tidak jelas) itu juga tidak besar sekali, karena sekarang dari kementerian PUPR sudah menghijaukan, kalau ada pelabuhannya kan dermaga besar-besar, rakyat besar sudah senang, disamping itu dapil saya, Dirjen ... Darat pak Menteri saya sudah kedua kali membuat.... Danau Toba, berlayar 2 hari nanti bisa cek 14,15,16 itu sewa roco yang laki-laki (rekaman tidak jelas) wanita itu ada 75 orang, road show memperlihatkan ke masyarakat akibat sinar bangun, jangan naik kapal di Danau Toba, ini sudah kloter kedua saya laksanakan, tanggal 14,15,16 kita nginep di Samosir, terus disamping itu pak Dirjen, tolong juga tidak mahal itu pelabuhan di danau toba bikin kapal satu di pelabuhan ini, satu yang tetapi yang memenuhi standar, sehingga orang sana manut membuat kapal yang memenuhi standar.

Terus pak Sekjen itu bus itu (rekaman tidak jelas) kalau bapak bikin bus lagi Sumatera Utara harus di bagi, Sumatera Utara itu Bimas, asal (rekaman tidak jelas) malu di anaknya naik bus, sehingga bus-bus itu dipakai oleh pejabat-pejabat tertentu saja kalau ngak ya (rekaman tidak jelas) kalau saya bilang agak suudzon menyampaikan, tolong di kaji kembali, tolonglah kepada prioritas-prioritas utama seperti saya ketemu Bang Luhut seperti KSM dan itu lampu penerangan darat, dan kebetulan ini janji-janji kampanye, kita sudah mau dekat ini, tahun pemilu.

Terus saya akan bahas dengan (rekaman tidak jelas) pak Menteri sebenarnya tolong dari kesekjenan atau biro kepegawaian, kalau (rekaman tidak jelas) itu ditembuskan kepala Daerah sehingga kepala daerah yang membutuhkan tahu apa yang dibutuhkan.

Itu kira-kira yang lain, KNKT itu, sebenarnya di Undang-undang nomor 17 tahun 2018 (rekaman tidak jelas) kecuali di udara, jadi zaman sekarang itu seolah-olah kejadian dari KMK.. bahkan dia memberikan keterangan di umum, sebenarnya dia itu hanya memberi keterangan ke Menteri dan ke DPR RI, terus tolong dikaji pak Sekjen, di perhubungan laut, berapa orang yang memiliki, dijajah kelautan latar belakang kelautan di perhubungan laut, ada tertulis, (rekaman tidak jelas).

Demikian bisa saya sampaikan, terima kasih pimpinan, terima kasih pak Menteri.

*Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

**Terima kasih pak Anton.**

Baik sekarang semua sudah, sekarang dimeja pimpinan, ini yang mau ngomong hanya pak Anton saja, Lasarus hanya sedikit saja.

**F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si.):**

**Terima kasih ketua.**

**Pak Menteri beserta jajarannya.**

**Beserta anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.**

Langsung saja pak Menteri, Kemenhub dalam menghemat anggaran belanjanya yang katanya bisa mencapai 1 trilyun dengan memaksimalkan metode KSP KPBU di beberapa fasilitas pelayanan angkutan, ini merupakan satu hal yang baik, tetapi apakah sudah mempertimbangkan yang mana nilai manfaat dan kerjasamanya dapat membenahi masyarakat sebagai pengguna fasilitas layanan angkutan seperti harga parkir kendaraan, harga makan dilayanan tersebut dan lain-lain, yang kedua pak Menteri layanan kepada masyarakat harus ditingkatkan terutama pelayanan keselamatan penumpang.

Termasuk barang bawanya, saat ini baru bandara yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang melalui teknologi X-ray, bagaimana dengan pelabuhan, terminal, dan kereta api.

Dalam bahan tercatat 9 bandara yang dikerjasamakan dalam bentuk (rekaman tidak jelas) PPMN dan KPBU yang mana anggaran tersebut dialihkan ke 6 bandara yang baru, sekarang pertanyaannya apakah sudah dipastikan, kepastian pihak investor terhadap 9 bandara, terhadap anggaran tersebut sebelum dialihkan, dalam kebijakannya kerjasamanya KSP perlu diiringi dengan peningkatan kemampuan SDM melalui sekolah Diklat di Kemenhub apakah (rekaman tidak jelas) dilingkungan Kemenhub diakui oleh Dikti, terakhir pak Menteri sesuai dengan pak Alex tadi, kita meminta anggaran kelengkapan transportasi darat agar ditingkatkan minimal sama seperti tahun kemarin, guna menunjang peningkatan aspek, peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sesuai dengan rapat kita pak Menteri tanggal 4 Juli di point ketiga ini dinyatakan Komisi V DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menambah anggaran Dirjen Perhubungan darat, kementerian Perhubungan kemn keselamatan dan kenyamanan darat.

Jadi itu yang kami minta pak Menteri sesuai dengan rapat tanggal 4 Juli yang terakhir tadi dikatakan pak Anthon Sihombing, 3-4 hari yang lalu datang sekitar 80 orang pelaut memberikan petisi disampaikan secara lisan, mungkin akan kami sampaikan pak Menteri secara langsung, demikian terima kasih pak ketua terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik pak Lasarus silakan pak.

**F-PDIP (LASARUS, S.SOS):**

**Pak ketua.**

**Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.**

**Pak Menteri dan seluruh jajaran.**

Sedikit saja pak Menteri, kami beri kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengurangan anggaran ini, memang saya lihat PR kita untuk perhubungan ini lumayan berat, sebagai mitra kerjanya kementerian.

Ini anggaran dari kementerian perhubungan turun cukup tajam, dari APBN 2019, teman-teman banyak menyampaikan tadi terkait dengan salah satu contoh di beberapa program yang memang sangat dibutuhkan di dapil seperti di Jenderal Perhubungan Darat, akibatnya ada banyak kegiatan-kegiatan yang prioritas nanti tidak bisa di cover dengan pengurangan anggaran yang begitu besar.

Saya juga lihat contoh di dapil saya sendiri saya sudah sampaikan dari beberapa rapat yang lalu, terkait pembangunan pelabuhan sungai di Sintang pak, ini Dirjen dulu pernah sampaikan kesaya, pernah di handel di 2018 tetapi juga tidak tercover saya lihat sampai hari ini belum ditangani, dan waktu itu saya bawa rombongan komisi pak, Komisi V DPR RI ke lokasi situ dan setiap kali pulang berpapasan sama Bupati pasti ditanya kita.

Kita sudah tinjau tetapi mungkin ini juga imbas terjadinya pemotongan, hendaknya kami mohon pak, ini bisa jadi prioritas tahun 2019, sudah dimulai oleh Pemda pembangunannya hanya mangkrak sampai ini hari, kalau memang keterbatasan Pemerintah daerah pak.

Kami harap ada juga APBN disitu sebetulnya diatasnya itu untuk seperti tempat gudang dan segala macam, memang pelabuhannya yang perlu ditangani dengan APBN, kemudian yang kedua, saya kebandara pak itu mohon kiranya untuk tetap dilanjutkan pembangunannya, memang dari aspek pengembangan wilayah Kalimantan Barat saya pikir juga kementerian Perhubungan pasti sudah punya master plan yang mumpuni untuk Kalimantan Barat ini, saya waktu reses terakhir ketemu dengan Danrem disana pak, bintang satu pak, Brigadir Jenderal sudah mengajukan juga lahan dilokasi ini, baik dari TNI angkatan darat maupun angkatan udara, betapa strategisnya bandara ini pak.

Pak Menteri sudah ada surat resminya kepada Pemerintah daerah kabupaten Sintang untuk menyiapkan lahan, untuk mereka nyimpan, kalau TNI angkatan darat itu, penyimpanan helikopter dilokasi ini, bandara ini sekarang posisi 1600, (rekaman tidak jelas) tahu betul sekarang menuju 1800, harapan kami paling tidak kita kejar ke 2000 lah, minimal ke 2000 dulu sehingga bombardir bisa masuk harapan orang sana pak yang jaraknya kalau dari (rekaman tidak jelas) itu bisa sampai 12 jam menuju pontianak, memang ada pesawat dari Kapuas ini tetapi transit di Pontianak inikan biaya juga kalau mau ke Jakarta pak, harapan masyarakat kalau bandara ini sudah bisa 2000 meter saja, itu 6R yang bodynya pendek itu kalau saya tidak salah 737 seri 500 A 200 itu sudah bisa pak di 2000 meter.

Masyarakat dari 5 kabupaten ini pak, sudah 1 juta lebih penduduk, ini bisa langsung ke Jakarta tanpa mesti transit, ini harapan masyarakat disana, karena jarak disana kalau jalan darat ya saya sampaikan tadi pak, itu 6 sampai 7 jam menuju kota Pontianak, ya mungkin dari aturan ketentuan kementerian perhubunganpun sudah masuk daerahnya, apalagi juga ini daerah perbatasan langsung pak, simpang ini berbatasan langsung dengan Malaysia pak.

Jadi saya rasa tambahan sedikit saja lain-lain mungkin kami pertajam di rapat dengan Eselon I nanti, sebelum saya akhiri saya harap nanti memang penajaman di Eselon I nanti terkait dengan pemotongan ini memang kita sepakati karena begitu banyak program-program yang prioritas yang sudah kita bicarakan terdahulu, saya lihat juga kalau ini tidak ada peningkatan anggaran memang terjadi nanti banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan akhirnya capaian renstra pak Menteri juga terganggu ini, saya juga tidak memahami betul apa strategi terkait dengan pengurangan, sementara APBN kita meningkat, harusnya juga perhubungan ini juga terus meningkat anggarannya, karena ada banyak sekali program kita yang masih perlu kita kejar, terkait dengan pembiayaan butuh biaya besar, contohnya kerta api dan sebagainya.

Saya rasa itu saja pak ketua, terima kasih, *Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, coba saya minta pak Menteri di cocokkan saja presentasi pagu anggaran yang diberikan kepada kita dengan nota keuangan Presiden yang kita dapatkan dari Banggar pak. Pun berbedanya tidak banyak tetapi tolong dicocokkan, itu yang pertama, terus yang kedua, tolong pak Menteri kembali membahas lagi berkaitan dengan hasil RDP kita itu ditanggal 4 Juli, itu khususnya dengan perhubungan darat, waktu itu kita rapat dengan perhubungan darat, kereta api, badan pengelola transportasi jabodetabek, kita melihat situasi kondisi waktu itu berkaitan dengan safety dan kenyamanan, kita minta khusus pak di point 3 supaya Dirjen Perhubungan Darat itu, ditambahkan anggarannya, disini malah dikurangi, walaupun dijalan dikurangi, ini pekerjaan rumah pak, jadi pasti hari ini belum memberikan persetujuan berkaitan dengan distribusi penganggaran masing-masing untuk Eselon 1, karena ini tidak menindaklanjuti berkaitan dengan hasil kesempatan kita ditanggal 4 Juli 2018, bagaimana yang disampaikan oleh teman-teman tadi pak Anton dan pak Alex.

Karena I sangat prinsip pak, berkaitan dengan masalah safety dan security, itu mungkin yang penting tolong dicek pak, hal-hal lain secara teknis disampaikan oleh teman-teman, nanti kita akan dalam tentang catatan-catatan yang saya sampaikan itu diperhatikan untuk kita akan membahas berkaitan dengan catatan yang sudah saya sampaikan, saya kira dari saya itu pak Menteri, silakan pak Menteri sudah setengah 6 tidak perlu dijawab satu persatu tetapi tolong pada saat pembahasan di RDP yang berkaitan dengan masukan dimasing-masing eselon itu dijawab secara tertulis dan kita akan

mulai membahas dari masukan-masukan para anggota termasuk catatan-catatan saya sampaikan.

Silakan pak Menteri.

## **MENTERI PERHUBUNGAN RI:**

Terima kasih pak ketua, bapak ketua, bapak wakil ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas banyak masukan dan secara khusus nanti saya akan bahas dengan Eselon I dan II, satu yang saya bisa pastikan bahwa ini akan selalu akan taat dengan Undang-undang dan nawacita apa yang direncanakan oleh bapak Presiden dan bapak wakil Presiden, yang kedua pengenaan anggaran ini memang menjadi kita tidak mudah tetapi kami bersepakat bahwa ada upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan optimasi dan secara kebetulan program-program dari KPPU KSP ini sudah pada titik tertentu bisa diselesaikan, oleh karenanya secara umum saya jawab bahwa bandara-bandara tersebut sekarang ini sudah komersial dan itu akan kita KPPU kan kepada BUMN dan swasta dan kami jamin bahwa apa yang kita lakukan adalah terbatas pada perjanjian.... Selama 20 tahun, artinya disatu sisi, sebagai contoh katakan di Bengkulu, Bengkulu itu kita anggarkan 90 milyar 2019, anggaran itu kita tidak berikan tetapi kita akan berikan kepada BUMN dan swasta, BUMN dan swasta tidak saja mengelola tetapi juga membangun.

Sehingga apa yang kita rencanakan di sana itu dicover oleh BUMN beserta swasta karena kita juga memberikan opsi tetapi memang BUMN sebagai mayoritas, uang ini itulah yang dipakai untuk membiayai seperti apa yang ada di (rekaman tidak jelas) long apung (rekaman tidak jelas) ada di Papua, di Konserai di Lampung, Sukabumi ada di Jember dan sebagainya, sehingga yang tadinya tidak mendapatkan anggaran maksimal ada di Jember dan sebagainya, sehingga yang tadinya tidak mendapatkan anggaran maksimal bisa maksimal.

Beigtu juga terjadi di pelabuhan di laut dan di darat, secara khusus memang darat ini akan menjadi perhatian kami, kami akan melakukan suatu semacam pendalaman tentang fungsi-fungsi apa yang masih di mungkinkan sehingga upaya memaksimalkan apa yang diharapkan oleh masyarakat menjadi aspirasi bapak masih bisa ditingkatkan, ini menjadi PR besar kita untuk melaksanakan itu, hal-hal yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, dari pak Ridwan pak Subarnya, pak Muhidin, tercatat ada 30 masukan, pak Nurhasan pak Bahrun pak Willem, pak Bambang Haryo, pak Hamka pak Jhony Allen, pak Sungkono, pak Anais, bu Eem, pak Bakri, pak Sahat, ibu Ana, pak Gatot, bu Novi pak Alex pak Rahmat, pak Irmawan, dan terakhir pimpinan pak Anton pak Lasarus, menjadi perhatian bagi kami untuk melakukan improvisasi, berkaitan dengan kekurangan-kekurangan yang harus kita tingkatkan.

Pada dasarnya yang kita lakukan adalah memang secara khusus laut ini menjadi satu atensi yang serius bagi ... oleh karenanya saya menugaskan kepada Dirjen darat dan Dirjen laut untuk membuat paling tidak contoh satu modul operasi improvement berkaitan dengan angkutan-angkutan laut dan

sungai dengan melakukan satu adalah pembuat SOP baru, memberdayakan Syah Bandar, memberikan pendidikan bagi nahkoda-nahkoda, juga memberikan pendidikan bagi Syah Bandar, membuat contoh-contoh baru sebagai contoh bukan karena pak Alen dan pak Anton, jadi memang selain kita membangun satu ... kita mungkin akan kita siasati pak, dana yang ada untuk kita ini kita berikan berupa suku bunga pada masyarakat, yang kerjasama dengan Bupati.

Kita seperti pak Jhoni bilang kita akan buat satu contoh, terus yang lain kalau mau kesini harus sesuai dengan itu, jadi kami tidak perlu membangun masyarakat yang puluhan ratusan itu bisa ikut, dan saya sudah bicara dengan Bupati mau melakukan, kalau menunggu semua itu uangnya tidak cukup pak, tanggung jawab itu kembali kekita, kita akan kembalikan ke masyarakat, karena memang masyarakat itu tidak mampu dengan tarif yang sekarang itu, tarfinya rendah sekali, (rekaman tidak jelas) Toba, selayar itu menjadi contoh jadi kalau nanti coba selayar baik, maka nanti kita dalam tahun ini juga akan membangun 8 titik di beberapa tempat, diantaranya kampungnya bu Intan ada disana, kita bangun disana.

Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu sampaikan ini sangat berguna bagi kami, kami lagi mengintesifkan beberapa upaya, dimana upaya tersebut bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu izinkan saya akan menjawab secara tertulis, tetapi kita akan dalam secara baik agar bisa tertampung.

Jadi pak Muhidin kita akan perhatikan itu untuk melakukan suatu upaya yang baik juga kepada pak Anton (rekaman tidak jelas) beberapa catatan yang memang berguna, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Menteri, saya kira kemarin kan di Asian Games kita pasti akan membahas pak, biasanya memang dalam pembahasan kita dengan pak Menteri kan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, kami akan membahas dengan para Eselon I, sebelum kita akan serahkan kepada Badan Anggaran pada pembahasan tahap pertama, nanti kita akan Rapat kerja dengan Pak Menteri lagi pak, jadi apa yang ktia bahas kita bersama-sama sebelum kita bawa ke Banggar nanti Rapat kerja dengan pak Menteri lagi.

Kemudian setelah itu kita putuskan untuk kita bawa ke Banggar, dari Banggar nanti kita putuskan lagi sinkronisasi lagi, ada pengurangan atau penambahan itu nanti kembalikan kekita lagi pak, kita bahas lagi ke pak Menteri kita bahas lagi dengan Eselon I sebelum kita serahkan final, kita bahas Rapat kerja dengan pak Menteri, jadi masih ada kurang lebih 3 kali ini, karena (rekaman tidak jelas) karena dengan inikan dengan Eselon I pak, memang kita sepakati dibawa ke Banggar, kita akan konfirmasi lagi dengan pak Menteri.

#### **F-PG (DRS. HAMKA BACO KADY, MS):**

Ketua sinkronisasi, jadi seolah-olah jangan ada perbedaan, jadi disinkronisasi dari itu.

#### **KETUA RAPAT:**

Untuk itu maka saya rasa kalau tidak ada lagi maka kita bisa langsung pada kesimpulan dengan catatan apa yang bisa disampaikan anggota tadi pada saat Rapat kerja dengan para Eselon I itu sudah dibisa dijawab secara tertulis pak, baik setuju ya kita langsung ke kesimpulan, silakan.

Iya ini yang pertama Komisi V DPR RI memahami ini istilahnya pak Alex kita belum setuju, paham dulu penjelasan, kementerian perhubungan terhadap alokasi anggaran dalam RAPBN tahun anggaran 2019 sebagai berikut, pagu kebutuhan 104 trilyun 49 milyar 55 juta 186 ribu, nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2018 atau 2019, 41 trilyun 54 milyar 917 juta 54 ribu.

Kekurangannya 62 trilyun 494 milyar 138 juta 132 ribu, selanjutnya Komisi V DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesudah mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

Dua, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat di kabupaten kota tertentu akan disesuaikan dengan saran, pendapat dan usulan Komisi V DPR RI sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian rapat pendahuluan RAPBN tahun 2019 serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit eselon I dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2019 pada Rapat kerja mendatang.

Silakan pak.

#### **F-PDIP (ALEX INDRA LUKMAN):**

Hanya dua kesimpulan, tadi banyak anggota berbicara soal keinginan kita untuk meningkatkan alokasi anggaran perhubungan darat, apakah kesimpulan nomor 1 mau dipertajam manakala terjadi penambahan kita arahkan kepada perhubungan darat, saya kira perlu.

#### **KETUA RAPAT:**

Kita punya anu pak, inikan mengikat dengan kesimpulan kita sebelumnya pak, jadi kita memang belum mendapat persetujuan terhadap detail Eselon I itu dalam rangka kita mau mendengarkan nanti dari pak Menteri, upaya-upaya dan kesimpulan kita untuk menambah anggaran dari

Dirjen Perhubungan Darat, jadi itu bagian dari itu pak sebetulnya, dikesimpulan kita ada, nanti kita akan tanya dikesimpulannya. Itu pak ya, begini pak, di rapat kita inikan bagian dari pembahasan kita pada tanggal 4 Juli, itu di 4 Juli kita ada rapat itu ada point 3 Komisi V DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menambah anggaran Dirjen Perhubungan Darat, ada pak, kementerian Perhubungan terkait dengan keselamatan dan transportasi darat, untuk itu maka kita setuju dulu besarnya nanti pak Menteri bahas lagi bersama-sama di kementerian untuk memikirkan bagaimana supaya ada penambahan untuk Dirjen Perhubungan Darat, apakah diambil darimana dan sebagainya, tetapi ini mengikat kesimpulan ini.

Cukup pak ya.

.....:

Interupsi pimpinan setuju untuk meminta tambahan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pak ketua, cuma harusnya sudah ada jumlah supaya yang bisa kita perkirakan di perjuangkan juga bisa, kapan itu jumlah apakah setelah pendalaman ataukah jumlah yang bisa kita tambahkan disini, ataukah nanti terakhir, seperti contoh misalnya kalau misalnya 1 sampai 2 trilyun untuk secure dan safety termasuk pengadaan kapal ro-ro In Sha Allah kami akan memperjuangkan itu, kalau angkanya nanti kita sepakati asal jangan terlalu besar, jadi detail di Dirjen Darat itu harus jelas, apakah nanti setelah pendalaman atau sekarang, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik pak, ini tadi sudah ada kesimpulan nanti kita kembalikan ke pak Menteri, (rekaman tidak jelas) nanti akan dibawa ke kita pak, ini tugas yang kita berikan kepada Menteri Perhubungan, setuju pak ya, kalau tidak ada pak Menteri silakan.

#### **MENTERI PERHUBUNGAN RI:**

Seperti yang tadi disampaikan dan diamini oleh masalah rapat yang tidak pernah berdiri sendiri, sebelum ini ada rapat kita yang juga telah, juga sama memahami, itu ada satu soal masalah pagu, pagu indikatif, yang sudah kita pahami sebelumnya. Jadi harusnya ada masuk angka itu yaitu sebesar 44 trilyun untuk kementerian Perhubungan, didalam kesimpulan rapat itu, kita juga kemudian bersepakat bahwa Komisi V DPR RI itu bersepakat dengan kementerian untuk memperjuangkan penambahan anggaran.

Ketika kesimpulan rapat di pagu indikatif, mungkin sekretariat bisa menayangkan kesimpulan rapat pada saat pembahasan pagu indikatif, terima kasih pimpinan.



## **KETUA RAPAT:**

Ini namanya adalah tahapan pembahasan, naik pangkat juga tahapan, tidak ada yang namanya tahap 1 langsung ke tahap 5, dan semua akan, tadi itu definitif, pagi indikatif ke definitif, pagu indikatif tidak kita bahas lagi, dan sekarang adalah definitif, definitif Banggar bekerja, hasil Banggar masuk ke definitif plus-plus kemana, jadi tahapan jadi disini kita tidak perlu karena itu namanya siklus ini sudah paten, tadi point dua ini kebijakan, kalau siklus bukan kebijakan, harus dijalani, terima kasih.

Jadi itu dalam pembahasan dengan pak Menteri memang kita lebih fokus kepada gelondongannya, ini 41,554 ini kita setuju dulu, nanti pekerjaan rumah yang kita berikan kepada pak Menteri itu adalah bagaimana ini permintaan kita berkaitan dengan Dirjen Perhubungan Darat, mudah-mudahan bisa di jawab besok, pada saat minggu depan, oh sudah ada tanda-tanda ini, kan itu, nanti dibawa kita kesini, kalau ada masih dia kurang dan sebagainya, nanti kita akan bawa ke Banggar, dari hasil kesimplannya.

Baik pak, terima kasih, pak Menteri bagaimana dengan kesimpulan ini, setuju pak?

## **MENTERI PERHUBUNGAN RI:**

Setuju pak jadi apa yang menjadi catatan bapak-bapak Komisi V DPR RI (rekaman tidak jelas) artinya memang kita semaksimal mungkin manage apa yang ada di kami, tetapi dalam hal terjadi kekurangan tadi sudah sampaikan untuk jika mungkin ada alokasi tambahan, kira-kira seperti itu.

## **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih kalau begitu kita simpulkan, sebagaimana yang mesti saya bacakan kesimpulan kita tadi, kita setuju.

(RAPAT SETUJU)

Kita beri applause dong inikan pembahasan 2019 masa tidak di applause, ya kita punya pimpinan sudah berpelukan mestinya kita lebih ademlah, pak Menteri silakan kalau ada hal yang mau disampaikan sebagai kata sambutan akhir.

## **MENTERI PERHUBUNGAN RI:**

**Bapak ketua Komisi V DPR RI.**

## **Bapak Ibu anggota.**

Saya pikir kita cukup produktif membahas hal-hal secara detail dan substansi-substansi, bapak berikan kepada kami sangat baik, oleh karenanya kami menyambut baik bahasan itu, dan saya akan bahas dengan Eselon I dan II, karena substansi untuk memberikan suatu kemaslahatan bagi umat itu sangat penting, oleh karenanya saya ucapkan terima kasih, rapat yang produktif ini, semoga kita bisa mendapatkan angka-angka memberikan dan memastikan konektifitas yang merupakan amanah bahwa kita bisa dilaksanakan dengan baik, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Menteri saya kira cukup, ini pak Menteri dalam rapat internal bersepakat, kedepan kita lebih banyak rapat dilapangan pak, sehingga mohon pak Menteri, pak Sekjen mendistribusikan para Pejabat, pada saat kita kunjungan kerja ke lapangan hingga ada beberapa yang bisa kita putuskan dilapangan, terima kasih, kalau tidak ada lagi saya menutup dengan permohonan maaf, kalau ada yang kurang berkenan, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 18.00 WIB**